



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu institusi karena pada LKjIP dilaporkan capaian indikator kinerja tahun 2025 yang mencakup aspek pendukung yang memberikan konstribusi bagi terwujudnya good governance dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diharapkan sebagai upaya dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dalam penyusunan LKjIP tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang positif dan kritik yang konstruktif guna mengembangkan kinerja peneliti sehingga LKjIP tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan ide / gagasan dalam menyusun LKjIP ini.

KEPALA

DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19721222 199403 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan atau pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

- 1) Jumlah Trayek Yang Diakses
- 2) Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
- 3) V/C Rasio di jalan Provinsi
- 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- 5) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2025 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp. 17.047.400.091 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 16.482.352.107 (96,69 %), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.907.071.942 terealisasi sebesar Rp. 9.605.134.111 (96,95 %).
- Belanja Penunjang Urusan dengan anggaran sebesar Rp. 15.298.876.719 terealisasi sebesar Rp. 14.848.080.617 (97,05 %).
- Belanja urusan sebesar Rp. 13.550.353.347, terealisasi sebesar Rp.11.916.081.857 (87,93 %).



Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 14 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 234.000.000, realisasi sebesar Rp. 203.310.000 (86,88 %). Sisa anggaran Rp. Rp30.690.000 merupakan honorarium pengelola keuangan akibat penyesuaian besaran sesuai Perpres 31.

2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.704.000, realisasi sebesar Rp. 10.141.000 (79,83 %). Sisa anggaran Rp. Rp2.563.000 merupakan sisa belanja lembur.

3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.365.000, realisasi sebesar Rp. 18.842.000 (80,64%). Sisa anggaran Rp. 4.523.000 merupakan sisa belanja lembur.

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.411.000, realisasi sebesar Rp. 9.776.100 (67,84 %). Sisa anggaran Rp. 4.634.900 merupakan sisa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik, souvenir dan kegiatan kantor lainnya.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.570.500, realisasi sebesar Rp. 71.237.030 (84,23 %). Sisa anggaran Rp 13.333.470 merupakan sisa belanja kertas, bahan cetak, dan bahan bacaan peraturan perundang undangan.

6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 295.404.000, realisasi sebesar Rp 238.021.398 (80,57 %). Sisa anggaran Rp57.382.602 merupakan sisa belanja jasa iklan, tagihan air, tagihan telepon, tagihan listrik, kawat, dan jasa pelayanan umum kantor.

7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 412.355.187, realisasi sebesar Rp 350.631.540 (85,03 %). Sisa anggaran Rp61.723.647 merupakan sisa belanja makan minum rapat dan biaya komponen rambu-rambu.

8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.440.000, realisasi sebesar Rp. 720.000 (50 %). Sisa anggaran Rp720.000 merupakan sisa belanja makan minum rapat, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi.

9. Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B

[UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.982.000, realisasi sebesar Rp 2.400.000 (80,48 %). Sisa anggaran Rp582.000 merupakan sisa belanja makan dan minum rapat, dan peningkatan kapasitas kompetensi SDM.

10. Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B

[UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]


Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.525.000, realisasi sebesar Rp. 1.200.000 (78,69 %). Sisa anggaran Rp325.000 merupakan sisa anggaran peningkatan kapasitas kompetensi SDM pengelola terminal penumpang tipe B.

11. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.113.000, realisasi sebesar Rp 10.203.000 (84,23 %). Sisa anggaran Rp1.910.000 merupakan sisa belanja makan dan minum rapat.

12. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.440.000, realisasi sebesar Rp 1.111.000 (45,53 %). Sisa anggaran Rp1.329.000 merupakan sisa belanja makan dan minum rapat, serta pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal.



13. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.830.000, realisasi sebesar Rp 1.230.000 (67,21%). Sisa anggaran Rp600.000 merupakan sisa belanja makan dan minum rapat, serta fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun masih perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan Kinerja Dinas yaitu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas pokok dan fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber daya Manusia	7
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.3.1 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Konektivitas)	20
3.3.2 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio angka Kecelakaan lalu lintas)	59
3.3.3 Indikator Kinerja Tujuan (Nilai Akuntabilitas Kinerja).....	72
3.3.4 Indikator Kinerja Tujuan (Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi).....	77
3.4 Realisasi Anggaran.....	92
BAB IV PENUTUP	97
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	7
Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel II. 1 Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	15
Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025	16
Tabel III. 1 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel III. 2 Target dan realisasi Rasio Konektivitas Tahun 2025.....	20
Tabel III. 3 Jumlah trayek yang dibutuhkan dan trayek yang dilayani.....	22
Tabel III. 4 Lintasan angkutan penyeberangan di Sumatera Barat.....	40
Tabel III. 5 Perbandingan rasio konektivitas dengan Kementerian Perhubungan	41
Tabel III. 6 Target dan realisasi sasaran strategis 1.....	43
Tabel III. 7 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;.....	44
Tabel III. 8 Realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di provinsi sumatera barat. 45	
Tabel III. 9 Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2025	47
Tabel III. 10 Lintasan kapal penyeberangan Sumatera Barat	48
Tabel III. 11 Jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2025 48	
Tabel III. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya.....	48
Tabel III. 13 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses	49
Tabel III. 16 Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2025	51
Tabel III. 17 Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025	52
Tabel III. 18 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum	53
Tabel III. 19 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum.....	55
Tabel III. 20 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum.....	58
Tabel III. 21 Target dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas.....	60
Tabel III. 22 Target dan realisasi sasaran strategis 2	62
Tabel III. 23 Penetapan Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Perhitungan Terkait Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2025	63
Tabel III. 24 Realisasi kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi di provinsi sumatera barat tahun 2025	63

Tabel III. 25 Perbandingan V/C Rasio tahun 2021 s.d 2025	66
Tabel III. 26 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi	68
Tabel III. 27 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi	69
Tabel III. 28 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi ...	71
Tabel III. 29 Target dan realisasi sasaran strategis 3	72
Tabel III. 30 Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 - 2025.....	73
Tabel III. 31 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	74
Tabel III. 32 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75
Tabel III. 33 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76
Tabel III. 34 Target dan realisasi sasaran strategis 3	77
Tabel III. 35 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran	78
Tabel III. 36 Nama responden dalam pengukuran indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	78
Tabel III. 37 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 1	79
Tabel III. 38 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 2	80
Tabel III. 39 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 3	81
Tabel III. 40 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 4	82
Tabel III. 41 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 5	83
Tabel III. 42 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 6	84
Tabel III. 43 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 7	85
Tabel III. 44 Hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2025	86
Tabel III. 45 Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tahun sebelumnya.....	87
Tabel III. 46 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	88
Tabel III. 47 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.....	90
Tabel III. 48 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	91
Tabel III. 49 Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	92
Tabel III. 50 Realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan Program	92
Tabel III. 51 Realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2025:.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	6
Gambar III. 1 kriteria penilaian realisasi kinerja.....	18
Gambar III. 2 Grafik Perbandingan realisasi dan % capaian Rasio Konektivitas.....	41
Gambar III. 3 Perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum.	52
Gambar III. 4 Rekapitulasi Jumlah kematian per tahun dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas.....	60
Gambar III. 5 Perbandingan realisasi kinerja VC Rasio 2021 - 2025.....	67
Gambar III. 6 Perbandingan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan transportasi sebagai urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mengimplementasikan ketentuan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan pedoman mengenai struktur dan klasifikasi perangkat daerah, dengan menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebutuhan daerah. Hal ini memastikan bahwa urusan transportasi yang menjadi kewenangan provinsi dikelola dengan baik.

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, penyesuaian struktur perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021, yang merupakan perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam peraturan daerah ini, perangkat daerah diklasifikasikan ke dalam tiga tipe (A, B, C). Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai perangkat daerah tipe B, yang bertanggung jawab atas urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

Pengaturan lebih rinci mengenai struktur dan fungsi Dinas Perhubungan tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan. Peraturan ini menetapkan pembentukan dua UPTD Kelas A, yaitu:

- a) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I
- b) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

Kedua UPTD ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya pengaturan ini, pengelolaan transportasi di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan efisien dan mendukung mobilitas serta pembangunan wilayah secara optimal.

B. Tugas pokok dan fungsi

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur ruang lingkup yang meliputi kedudukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Peraturan ini menetapkan bahwa Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas utama Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- b) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- c) Menyelenggarakan administrasi Dinas.
- d) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- e) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara optimal, setiap bidang dan sekretariat memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan sekretariat yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Sumatera Barat:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

- 
- kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis lalu lintas dan pembinaan keselamatan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan;
- c) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas, dan pembinaan keselamatan;
- d) pelaksanaan pembinaan di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan ke Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan penyiapan kebijakan teknis di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
- c) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
- d) pelaksanaan pembinaan di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan ke kabupaten/kota;
- e) pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang pelayaran.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- d) penyiapan rencana pembangunan sarana dan prasarana bidang pelayaran; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Penyelenggaraan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- 
- a) pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - c) pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan terminal;
 - d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan terminal;
 - e) pelaksanaan kegiatan pengawasan, penertiban dan penindakan pelanggaran angkutan umum dalam terminal;
 - f) pelaksanaan pemungutan retribusi pada terminal;
 - g) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan; dan
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

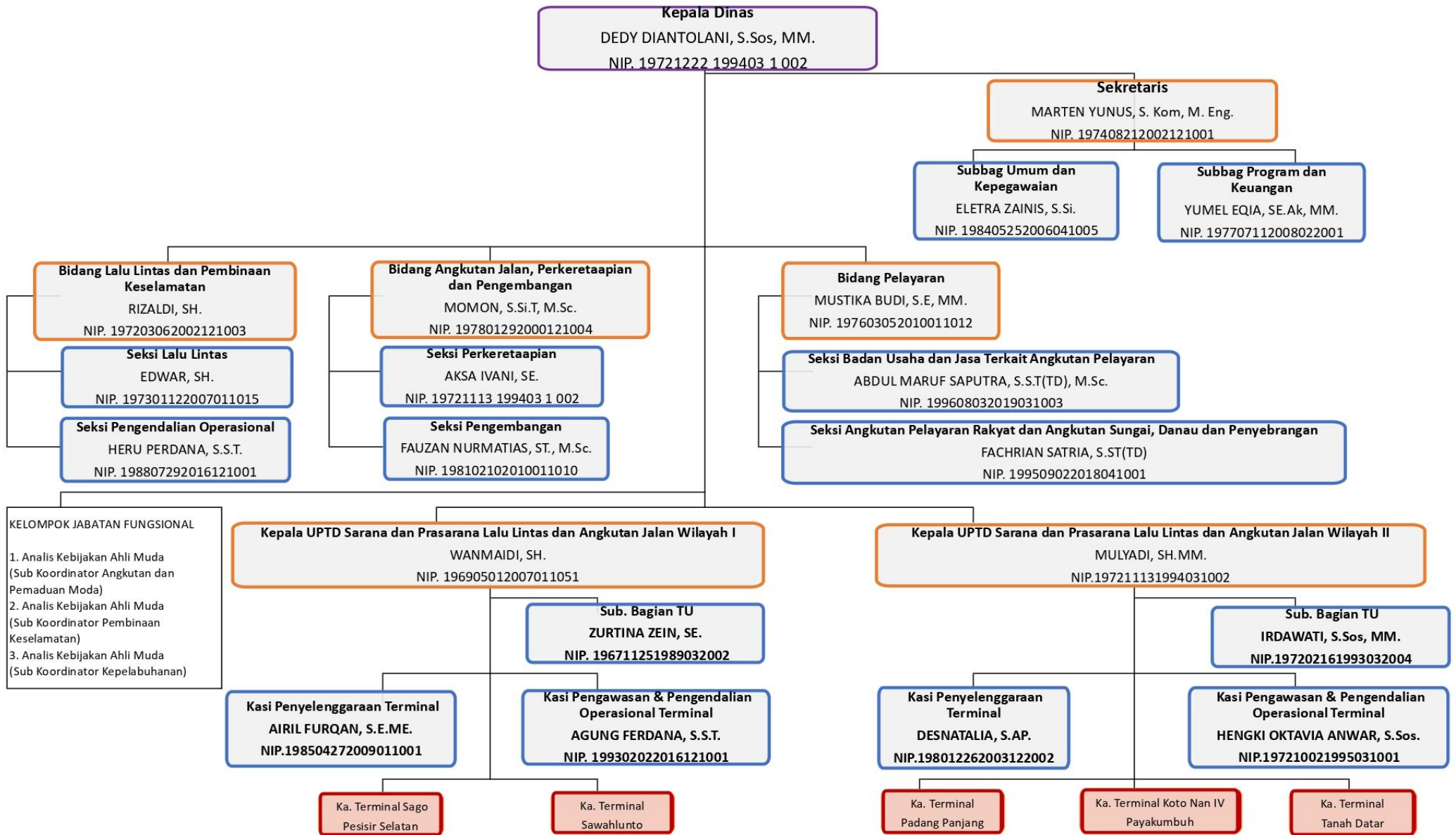
Dengan adanya pembagian tugas yang jelas di setiap bidang dan sekretariat, Dinas Perhubungan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung kelancaran sistem transportasi di Provinsi Sumatera Barat.

C. Struktur Organisasi

Dasar:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 20 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan hal diatas, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025:



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

D. Sumber daya Manusia

Jumlah Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Kondisi Desember 2025 adalah sebanyak 74 Orang, berikut rinciannya:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah
1	Gol I	-
2	Gol II	23
3	Gol III	41
4	Gol IV	10
	Total	74

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

No	Berdasarkan Esselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	13
4	Staf	54
	Total	74

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan


No	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1	S.2	7
2	S.1/D.4	30
3	D.3	20
4	D.2/D.1/SLTA	17
5	SLTP/SD	-
	TOTAL	74

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	56
2	PEREMPUAN	18
	TOTAL	74

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas tenaga teknis, Dinas Perhubungan telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD sejak tahun 2014. Kesepakatan ini mencakup pemenuhan kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat melalui dokumen MoU nomor 384/VI/HK201/STTD-2014 dan nomor 120-4/GSD/2014.

Pada tahun 2019, MoU tersebut diperpanjang untuk lima tahun ke depan dengan nomor HK.201/6/14/STTD-2019 dan nomor 120-030-PKS/GSB-2019. Sebagai hasil dari kerja sama ini, jumlah pegawai teknis yang merupakan lulusan STTD telah meningkat dari tahun 2014 hingga 2025. Mereka kini berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan tugas teknis di Dinas Perhubungan.

Namun, kebutuhan tenaga pelaksana administratif masih menghadapi tantangan dari segi kualitas dan kuantitas. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Kurangnya pengelolaan analisis jabatan dan beban kerja, sehingga distribusi pegawai belum ideal.
- b) Kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas sebagian besar pegawai masih perlu ditingkatkan.
- c) Perencanaan SDM yang belum komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kinerja.
- d) Minimnya pelatihan dan pendidikan khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana.

Selain SDM, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Dinas Perhubungan. Fasilitas utama mencakup satu gedung utama berlantai dua yang terdiri dari ruangan Kepala Dinas, Sekretaris, tujuh ruang untuk masing-masing bidang atau subbagian, tiga aula, serta toilet di setiap lantainya. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan juga telah menambah fasilitas Ruang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mendukung layanan informasi publik.

Fasilitas lainnya meliputi satu bangunan mushola, kantin, gudang, gedung tambahan untuk seksi Pengendalian Operasional bidang Lalu Lintas, serta pos satpam di pintu masuk dan keluar. Semua gedung dalam kondisi layak, meskipun membutuhkan pemeliharaan rutin setiap tahun.


1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam mendukung capaian kinerja Kepala Daerah karena sektor transportasi menjadi fondasi pergerakan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan daerah, Dinas Perhubungan berperan memastikan bahwa seluruh wilayah—baik perkotaan, perdesaan, kawasan pariwisata, maupun sentra-sentra ekonomi dapat terhubung secara memadai melalui layanan transportasi yang aman, efektif, dan terjangkau. Upaya peningkatan konektivitas wilayah melalui pembenahan trayek angkutan umum, penguatan layanan penyeberangan, revitalisasi terminal, dan dukungan terhadap simpul-simpul transportasi strategis merupakan instrumen penting dalam mewujudkan arah kebijakan Kepala Daerah yang menekankan pemerataan pembangunan dan peningkatan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.

Dari sisi keselamatan dan keamanan transportasi, Dinas Perhubungan juga menjalankan fungsi strategis yang sangat menentukan keberhasilan program prioritas Kepala Daerah dalam menciptakan ruang publik yang nyaman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Program pengendalian dan penurunan angka kecelakaan, penataan lalu lintas di wilayah provinsi, pengawasan perilaku berkendara, serta penegakan terhadap pelanggaran ODOL (*Over Dimension Over Load*) menjadi faktor penting dalam menjamin aktivitas transportasi berlangsung aman dan tidak menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi. Upaya ini tidak hanya menjaga keselamatan pengguna jalan, tetapi juga melindungi infrastruktur jalan agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung berbagai sektor pembangunan daerah.

Selain itu, transportasi memiliki peran lintas sektor yang sangat luas, sehingga berbagai kinerja pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyelenggaraan transportasi. Peningkatan kualitas konektivitas berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan logistik, peningkatan daya tarik wisata, kemudahan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pergerakan masyarakat antarwilayah. Dengan demikian, kontribusi Dinas Perhubungan tidak hanya terbatas pada aspek teknis transportasi, tetapi juga memberikan dukungan nyata terhadap stabilitas ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan pengembangan kawasan strategis yang menjadi prioritas Kepala Daerah.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Dinas Perhubungan juga memiliki aspek strategis melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, profesionalitas SDM, dan transformasi layanan transportasi. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pengelolaan layanan, dan tingkat kepuasan masyarakat menjadi bagian penting yang mempengaruhi penilaian kinerja Kepala Daerah secara keseluruhan. Upaya peningkatan integritas, transparansi, dan



responsivitas pelayanan publik menjadi elemen pendukung utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki kontribusi strategis yang sangat luas dan bersifat determinatif terhadap pencapaian kinerja Kepala Daerah. Keberhasilan program pembangunan daerah dalam bidang konektivitas, keselamatan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh kinerja Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, sektor perhubungan menjadi salah satu pilar penting yang memastikan visi pembangunan daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan.


1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan isu - isu kritical yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang dapat diantisipasi yang mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap pencapaian kinerja Sektor Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai permasalahan di bidang perhubungan yang dihadapi ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program Kepala Daerah, dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.


Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas layanan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Permasalahan ini muncul dari evaluasi pelaksanaan program, kondisi lapangan, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Masalah utama yang paling berpengaruh adalah permasalahan konektivitas dan permasalahan keselamatan transportasi, antara lain sebagai berikut:

1. Layanan angkutan belum merata di seluruh wilayah
Masih terdapat wilayah yang belum terlayani angkutan secara optimal, baik karena trayek yang tidak aktif, minimnya minat operator, maupun kondisi geografis yang menantang.
2. Pemanfaatan terminal dan simpul transportasi belum optimal
Beberapa terminal tipe B belum berfungsi maksimal sebagai pusat layanan angkutan. Kendala utamanya antara lain fasilitas yang belum memadai, aktivitas angkutan yang rendah, dan tidak meratanya penggunaan terminal oleh operator.
3. Integrasi antar moda belum berjalan secara efektif
Keterhubungan antara terminal, pelabuhan penyeberangan, dan simpul transportasi lainnya belum sepenuhnya terkoordinasi. Akibatnya, perpindahan

- 
- antar moda belum efisien dan belum mendukung mobilitas lintas wilayah secara optimal.
4. Layanan penyeberangan belum sepenuhnya mendukung konektivitas antar pulau
Sebagian lintasan penyeberangan belum beroperasi secara konsisten atau belum memiliki tingkat pelayanan yang memadai, sehingga menghambat kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
 5. Pertumbuhan kendaraan pribadi meningkatkan tekanan pada jaringan jalan
Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat menambah beban lalu lintas dan menyebabkan menurunnya tingkat pelayanan jalan di beberapa koridor, terutama di kawasan perkotaan dan ruas-ruas tertentu.
 6. Angka kecelakaan pada beberapa ruas masih tinggi
Meskipun terdapat upaya pengendalian, kecelakaan lalu lintas masih terjadi di beberapa titik rawan yang dipengaruhi oleh kondisi jalan, perilaku pengemudi, serta kurangnya fasilitas keselamatan.
 7. Pelanggaran ODOL masih signifikan
Truk dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai masih ditemukan di beberapa koridor logistik. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan.
 8. Perlintasan sebidang dengan kereta api masih berisiko
Beberapa perlintasan belum dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan pengguna jalan.
 9. Fasilitas keselamatan belum merata dan perlu peningkatan
Rambu, marka, dan fasilitas pengendalian lalu lintas belum memenuhi kebutuhan pada beberapa lokasi prioritas. Kondisi ini mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna.
 10. Kedisiplinan dan kepatuhan pengguna jalan masih rendah
Perilaku berkendara yang tidak tertib, seperti melanggar marka, tidak menggunakan helm, atau menghentikan kendaraan sembarangan, masih menjadi penyebab kecelakaan dan kemacetan.

Selain masalah di atas, terdapat permasalahan pendukung yang mempengaruhi baik konektivitas maupun keselamatan, yaitu:

1. Keterbatasan SDM teknis dan operasional
Jumlah dan kompetensi pegawai teknis masih belum sebanding dengan kebutuhan pengawasan dan pelayanan transportasi di lapangan.
2. Sarana dan prasarana pendukung operasional masih terbatas
Fasilitas seperti pos pengawasan, alat pengujian, sistem informasi, maupun perangkat pemantauan masih perlu diperbarui untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.
3. Koordinasi lintas sektor belum optimal



Kebutuhan koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, balai jalan, pemerintah kabupaten/kota, dan operator moda transportasi masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan transportasi lebih terpadu.

Permasalahan konektivitas dan keselamatan menjadi isu strategis utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi di Sumatera Barat. Penyelesaian kedua isu ini akan berdampak langsung terhadap kelancaran mobilitas, penurunan risiko kecelakaan, dan mendukung tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, **visi** daerah adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**, yang dilaksanakan melalui beberapa misi pembangunan jangka menengah. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan berperan mendukung pencapaian **Misi 6**, yaitu **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**.

Misi tersebut diuraikan ke dalam tujuan **Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Merata** dan sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, khususnya sasaran **meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi yang terintegrasi**. Pada sektor perhubungan, infrastruktur dimaknai sebagai simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun, beserta fasilitas pendukungnya seperti halte, shelter, dan dermaga penyeberangan. Integrasi infrastruktur transportasi berarti seluruh simpul tersebut saling terhubung sehingga mobilitas orang dan barang dapat berlangsung efektif, efisien, dan aman.


Indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kontribusi Dinas Perhubungan terhadap sasaran tersebut adalah **Rasio Konektivitas**, yang menggambarkan tingkat keterlayanan wilayah oleh moda transportasi darat dan laut, serta keterhubungan antarwilayah dan antar-simpul transportasi di Sumatera Barat. Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, semakin baik pula infrastruktur transportasi yang terintegrasi, yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.

Untuk mencapai kinerja Kepala Daerah, Dinas Perhubungan menetapkan visi perangkat daerah dalam Renstra 2021–2026, yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana prasarana transportasi yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan cara meningkatkan pelayanan, fungsi forum koordinasi lalu lintas angkutan & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi.



Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam tiga tujuan dan empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra.

Tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2021 - 2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek	6	6	6	6	6	6
				Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	Rasio	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45
3	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB 70,00	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	%	78%	79%	80%	81%	82%	83%

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan IKU dan IKD yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini tercermin dalam Indikator Kinerja Tujuan maupun indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan.

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025 dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan disesuaikan dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.


Berikut ini perjanjian kinerja perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,41
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,5%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.855.477.865	APBD
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2.253.810.929	APBD
3	Program pengelolaan pelayaran	6.710.000	APBD
4	Program pengelolaan perkeretaapian	4.880.000	APBD
Jumlah		9.120.878.794	APBD

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa penyesuaian target indikator kinerja sebagai respons terhadap capaian tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa target PK lebih realistis, berbasis data aktual, dan tetap mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Salah satu indikator yang mengalami perubahan adalah V/C Rasio jalan provinsi, di mana target Renstra tahun 2025 tercantum sebesar 0,47, namun realisasi tahun sebelumnya telah mencapai 0,41. Mengingat bahwa pada indikator ini nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi lalu lintas yang lebih baik, serta semakin mendekati angka 1 berarti semakin padat dan semakin buruk kualitas arus lalu lintas, maka target PK 2025 disesuaikan menjadi 0,41 untuk mempertahankan



kinerja positif yang telah dicapai. Penetapan target yang setara dengan realisasi ini dianggap tepat karena mencerminkan kondisi lalu lintas yang baik serta menjaga agar capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berjalan.

Perubahan juga dilakukan pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, di mana target Renstra tahun 2025 sebesar 72,50 telah terlampaui oleh realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 73,20. Dengan adanya capaian tersebut, target PK tahun 2025 dinaikkan menjadi 74,00 untuk menunjukkan komitmen peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk keberlanjutan upaya peningkatan tata kelola organisasi. Penyesuaian ini memastikan bahwa target kinerja tidak stagnan dan tetap memberikan tantangan yang sejalan dengan praktik pengelolaan kinerja yang baik.

Selanjutnya, indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi juga mengalami perubahan. Target Renstra 2025 sebesar 82% telah jauh terlampaui oleh realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 86,90%. Untuk menjaga relevansi dan konsistensi mutu pelayanan, target PK tahun 2025 ditetapkan meningkat menjadi 87,50%. Kenaikan ini merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan berdasarkan prinsip continuous improvement, di mana keberhasilan capaian tahun sebelumnya harus diikuti dengan target yang lebih tinggi dan mencerminkan peningkatan kualitas layanan kepada pegawai dan pemangku kepentingan internal.

Secara keseluruhan, perubahan target dalam Perjanjian Kinerja 2025 ini dilakukan berdasarkan analisis capaian aktual dan karakteristik masing-masing indikator. Penyesuaian ini memastikan bahwa target yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan Renstra, tetapi juga selaras dengan kondisi riil kinerja OPD, mendorong peningkatan kualitas layanan, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

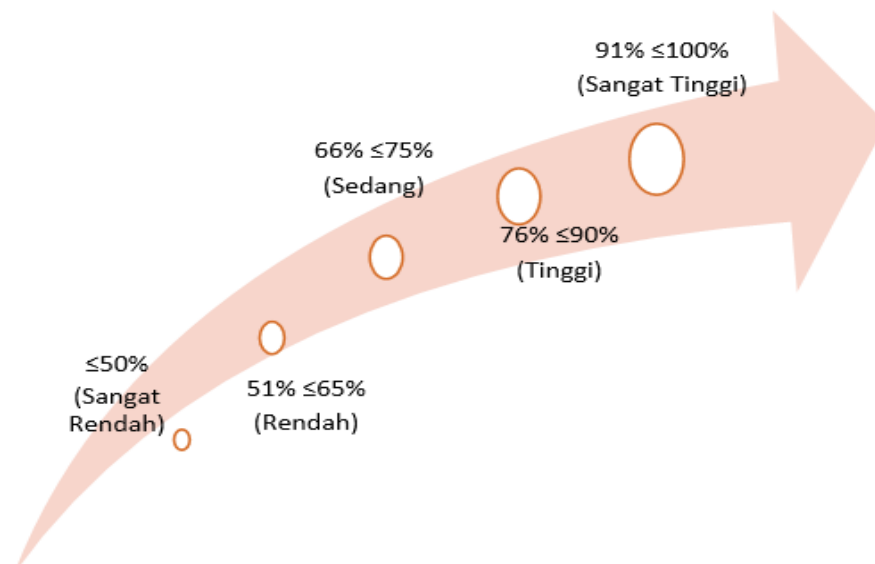
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar III. 1 kriteria penilaian realisasi kinerja

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan ingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menetapkan empat sasaran strategis yang diterjemahkan ke dalam lima Indikator Kinerja Sasaran. Kelima indikator ini digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan, terutama dalam aspek peningkatan konektivitas, peningkatan keselamatan transportasi, serta penguatan tata kelola organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian aktual di tahun berjalan. Berikut indikator kinerja yang menjadi ukuran utama kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025.

1. Jumlah Trayek Yang Diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
3. V/C Rasio di jalan Provinsi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 1 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang	20.512.858 orang	102,56 %
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,41	0,40	102,44 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,00 BB	76,68 BB	103,62 %
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,5 %	85,4 %	97,62%
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja					101,25%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah bagus. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

3.3 Capain Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis

3.3.1 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Konektivitas)

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas.

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah terlayani oleh moda transportasi (darat dan laut) serta tingkat keterhubungan antar wilayah, kawasan, dan simpul transportasi.

Untuk tahun 2025 penetapan target mengacu pada penghitungan rasio konektivitas Provinsi pada tahun awal RPJMD 2021 – 2026, berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 target rasio konektivitas tahun 2025 yaitu 0,691, artinya target Sumatera Barat sebanyak 69,1 % wilayah sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 0,682, target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi yaitu 0,691.

Berikut ini hasil perhitungan rasio konektivitas

Tabel III. 2 Target dan realisasi Rasio Konektivitas Tahun 2025

Tujuan : Meningkatkan konektivitas antar wilayah			
Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
Rasio Konektivitas	0,691	0,693	100,28 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Rasio Konektivitas Jalan Provinsi yang tercapai 0,693 % diukur berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan formula sebagai berikut:

Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut).
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Note:

- Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30 (sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)
- Untuk bobot trayek atau lintas berdasarkan jumlah perjalanan angkutan (frekuensi), yaitu:
 - a) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
 - b) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
 - c) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

Berikut ini hasil penghitungan rasio konektivitas pada tahun 2024:

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}} \\ &= \frac{142 \times 1}{183} \\ &= 0,776 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Untuk angka 142 merupakan lintasan trayek yang saat ini dilalui oleh operator angkutan dari jumlah kebutuhan trayek yaitu 183 trayek, berikut ini data lintasan trayek serta nama perusahaan yang melayaninya pada kondisi akhir tahun 2025:

Tabel III. 3 Jumlah trayek yang dibutuhkan dan trayek yang dilayani

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
1	1	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi	PT. Oke Oke Bos
			PT. Testing123
			PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Sinamar Transport Mandiri
2	2	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Sinamar Transport Mandiri
3	3	Padang - Lubuk Selasih - Solok	PT. Trans Mitra Ibu
			PT. Fifafel Perdana Trans
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Danau Raya Ibu
			PT. Jasa Malindo Ibu
4	4	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Sawahlunto	PT. Dirgantara Kencana Mulia
			PT. Fifafel Perdana Trans
			PT. Indra Trans Gemilang
			PT. Jasa Malindo Ibu
5		Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Sawahlunto	-
6		Padang - Lubuk Alung	-
7	5	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Sei. Limau	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
8	6	Padang - Lubuk Alung - Sicincin - Sei. Sarik - Pd. Sago - Balepoh	PT. Melsy Anugrah Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
9	7	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Sei. Limau - Sei. Geringging	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
10	8	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Lubuk Basung	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Dagang Pesisir Jaya
			PT. Lubuk Basung Express
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Bintang Lubuk Basung
PT. Harmonis Trans Mandiri			
11	9	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Lubuk Basung - Maninjau	PT. Dagang Pesisir Jaya
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Harmoni Lubuk Basung
12	10	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Matur - Koto Alam	PT. Bintang Rosa Transport
13	11	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Famili Ceria Group
14	12	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping - Panti	PT. Famili Ceria Group
15	13	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping - Panti - Rao	PT. Famili Ceria Group
			PT. Khatulistiwa Bonjo Pusako
16	14	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Talu - Panti	PT. Famili Ceria Group
17	15	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Sinamar Transport Mandiri
18	16	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki	PT. Sarah Nursyifa Transport
			PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Talago Jaya Prima

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
			PT. Sinamar Transport Mandiri PT. Sarah Nursyifa Transport
19	17	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	PT. Tintin Transport Sukra PT. Bahagia Family Express PT. Talago Jaya Prima PT. Sinamar Transport Mandiri PT. Sarah Nursyifa Transport
20	18	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Lubuk Bangku - Pkl.Kotobaru	PT. Tintin Transport Sukra PT. Yudha Transport Ekspres PT. Ayah Ibu Transport PT. Sarah Nursyifa Transport
21	19	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Kotobaru - Gn. Malintang - Muara Peti	PT. Tintin Transport Sukra PT. Ricky Rajo Transport PT. Sinamar Transport Mandiri PT. Sarah Nursyifa Transport
22	20	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Mahat	PT. Tintin Transport Sukra PT. Talago Jaya Prima
23	21	Padang - Padang Panjang - Batusangkar	PT. Yanti Citra Pelangi PT. Permata Ananda Transport PT. Batusangkar Indah Transport
24	22	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Sungayang	PT. Permata Ananda Transport PT. Batusangkar Indah Transport
25	23	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Tabek Patah	PT. Permata Ananda Transport PT. Batusangkar Indah Transport
26	24	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Pd. Ganting	PT. Batusangkar Indah Transport
27	25	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Balai Tengah	PT. Mata Air Lintau PT. Multi Karya Setangkai

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
28	26	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban - Balai Tengah	PT. Sarah Nursyifa Transport
			PT. Harapan Mama Transport
29		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Ampalu - Sitangkai - Balai Tengah	-
30	27	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Malalo	PT. Tanjung Jaya Mutiara
31	28	Padang - Padang Panjang - Malalo	PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
32	29	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang	PT. Telaga Indah Group
			PT. Tri Saudara Ekspres
33		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Balik - Sulit Air	-
34	30	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Sijunjung	PT. Indra Trans Gemilang
			PT. Jasa Malindo Ibu
35	31	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao	PT. Tampalo Prima Group
36	32	Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
37		Padang - Pasar Baru - Koto Ranah	-
38		Padang - Pasar Baru - Painan - Batang Kapas	-
39	33	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
40		Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Balai Selasa	-
41		Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Air Haji	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
42	34	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
43	35	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura - Tapan	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
44	36	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura - Tapan - Silaut	PT. Famili Ceria Group
45	37	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman	PT. Alisma Alizar Asmanelly
46	38	Padang - Lubuk Alung - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
47		Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat	-
48	39	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Sasak	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Bintang Pasaman Express
			PT. Armada Gading Sejati
49	40	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Talu	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Alisma Jaya Mandiri
			PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Bintang Pasaman Express
50	41	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading	PT. Alisma Alizar Asmanelly
51	42	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Bintang Pasaman Express
			PT. Armada Gading Sejati
52	43	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Desa Baru	PT. Famili Ceria Group
			PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Armada Gading Sejati
53	44	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh	PT. Telaga Indah Group
			PT. Usaha Murni Pratama

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
54	45	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh - Pd. Aro	PT. Telaga Indah Group
			PT. Usaha Murni Pratama
55		Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh - Liki - Leter W	-
56	46	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Sp. Sikabau - Sp. Kotobaru - Ampalu	PT. Tampalo Prima Grup
57	47	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao - Kotobaru - Sei. Rumbai	PT. Indra Trans Gemilang
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Tampalo Prima Group
58	48	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao - Kotobaru - Abaisiat - Sitiung Iv	PT. Tampalo Prima Group
59		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Tanah Bedantung - Kiliranjao - Sei. Rumbai - .Kt. Besar	-
60		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Sitiung - Timpeh	-
61	49	Bukittinggi - Piladang - Payakumbuh	PT. Pelita Arruya Mandiri Utama
			PT. Yudha Transport Ekspres
62	50	Bukittinggi - Padang Panjang	PT. Pelita Indah Travel
			PT. Pelita Arruya Mandiri Utama
			PT. Karya Abadi Jaya Utama
			Kop. Angkutan Sakato
			PT. Ransam Indah Transport
			PT. Silvia Indah Mandiri

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
63	51	Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok	PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Tri Saudara Ekspres
			PT. Binuang Express Group
64	52	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Ombilin - Solok	PT. Silvia Indah Mandiri
65	53	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Pd. Ganting - Sawahlunto	PT. Emkazet Sejahtera Lestari
			PT. Permata Bunda Transport
			PT. Grand Son Indah
66	54	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	PT. Silvia Indah Mandiri
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
67	55	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman - Sei. Limau	PT. Melsy Anugrah Transport
68	56	Bukittinggi - Sp. Koto Tuo - Malalak	PT. Pelita Indah Travel
69	57	Bukittinggi - Matur - Lawang	PT. Pelita Indah Travel
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Teratai Satria Jaya
70	58	Bukittinggi - Matur - Palembang	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Teratai Satria Jaya
			PT. Setia Utama Mandiri
71	59	Bukittinggi - Matur - Palembang - Koto Alam	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Setia Utama Mandiri
72	60	Bukittinggi - Matur - Maninjau	PT. Setia Utama Mandiri
			PT. Harmonis Ceria Wisata
73	61	Bukittinggi - Matur - Maninjau - Lubuk Basung	PT. Setia Budi Wisata
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Harmoni Lubuk Basung
			PT. Harmonis Trans Mandiri
74	62	Bukittinggi - Baso - Padang Tarok	PT. Pelita Indah Travel
			PT. Pelita Arruya Mandiri Utama

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
75	63	Bukittinggi - Simp.Tigo Baleh - Kubang Putih - Sei. Pua - Kapalo Koto - Badorai	PT. Penampung Jaya Lemersing
76	64	Bukittinggi - Tj. Alam - Sp. Biaro - Lasi - Pasanehan	PT. Fajar Kalimantan Jaya PT. Merapi Ceria Mandiri
77	65	Bukittinggi - Pincuran - Sp. Tabik - Durian - Sei. Dareh (Tilatang Kamang)	PT. Putra Salam Prima PT. Kamang Jaya Agam
78	66	Bukittinggi - Tj. Alam - Sp. Sikabau - Bukik Kulirik - Sp. Pintu Koto - Bt. Baragung	PT. Putra Salam Prima PT. Kamang Jaya Agam
79	67	Bukittinggi - Pakan Kamih - Koto Panjang - Pakan Sinayan - Tarusan	PT. Putra Salam Prima PT. Kamang Jaya Agam
80		Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping	-
81	68	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti	PT. Famili Ceria Group
82	69	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Rao	PT. Famili Ceria Group PT. Khatulistiwa Bonjo Pusako
83	70	Bukittinggi - Baso - Sp. Batu Hampar - Suayan	PT. Pelita Indah Travel
84	71	Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban	PT. Putra Agung Sepakat
85	72	Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki	PT. Putra Agung Sepakat
86	73	Bukittinggi - Payakumbuh - Koto Tinggi	PT. Putra Agung Sepakat

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
87	74	Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Koto Baru	PT. Bintang Terang Binter Galuang
88	75	Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Ma. Peti	PT. Kapur Indah Abadi
89	76	Bukittinggi - Baso - Batusangkar	PT. Bintang Utara Transport
			PT. Grand Son Indah
			PT. Harapan Mama Transport
			PT. Minang Jaya Transport
			PT. Ras Jaya Transport
PT. Haji Maswardi Sekeluarga			
90	77	Bukittinggi - Padang Panjang - Batusangkar	PT. Silvia Indah Mandiri
91	78	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Balai Tengah	PT. Mata Air Lintau
92	79	Bukittinggi - Payakumbuh - Balai Tengah	PT. Mata Air Lintau
			PT. Multi Karya Setangkai
93	80	Bukittinggi - Padang Panjang - Sumpur - Malalo	PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
94	81	Bukittinggi - Pd. Luar - Pasar Amur - Koto Baru - Pandai Sikek - Koto Laweh	PT. Pelita Indah Travel
95	82	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung	PT. Emkazet Sejahtera Lestari
			PT. Permata Bunda Transport
			PT. Grand Son Indah
			PT. Muaro Jaya Transport
96	83	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung	PT. Tanjung Jaya Mutiara
97	84	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao	PT. Silvia Indah Mandiri
			PT. Tampalo Prima Group
98		Bukittinggi - Payakumbuh - Balai Tengah - Sitangkai -	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Kumanis - Sumpur Kudus	
99	85	Bukittinggi - Padang Panjang - Batusangkar - Sitangkai - Kumanis - Sumpur Kudus	PT. Karya Abadi Jaya Utama
100	86	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Sinamar Transport Mandiri
101	87	Bukittinggi - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan - Balai Selasa	PT. Zona Sikumbang Jaya
			PT. Famili Ceria Group
			PT. Sinamar Transport Mandiri
102	88	Bukittinggi - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan - Balai Selasa - Tapan	PT. Zona Sikumbang Jaya
			PT. Famili Ceria Group
			PT. Sinamar Transport Mandiri
103	89	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	PT. Melsy Anugrah Transport
104	90	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat	PT. Famili Ceria Group
			PT. Khatulistiwa Bonjo Pusako
105		Bukittinggi - Kumpulan - Malampah - Pd. Sawah - Kinali - Sp. Empat	-
106	91	Bukittinggi - Kumpulan - Malampah - Pd. Sawah - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Famili Ceria Group
107	92	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk	PT. Bintang Rosa Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Basung - Manggopoh - Kinali - Sp. Empat	
108	93	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Kinali - Sp. Empat - Talu	PT. Famili Ceria Group
109	94	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading	PT. Harmoni Lubuk Basung
110	95	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Famili Ceria Group
			PT. Bintang Pasaman Express
111	96	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Desa Baru	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Famili Ceria Group
112	97	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Sasak	PT. Famili Ceria Group
113	98	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Lb. Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh	PT. Tri Saudara Ekspres
114	99	Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Lb. Selasih - Pd. Aro	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Ricky Rajo Transport
115	100	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Sp. Koto Baru - Ampalu	PT. Tampalo Prima Group

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
116		Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Sei. Dareh - Koto Baru - Tj. Simalidu	-
117	101	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Silvia Indah Mandiri PT. Sinamar Transport Mandiri PT. Tanjung Jaya Mutiara PT. Danau Raya Ibu PT. Tampalo Prima Group
118	102	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Abai Siat - Sitiung	PT. Muaro Jaya Transport
119	103	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Timpeh	PT. Tampalo Prima Group
120	104	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok	PT. Sinamar Transport Mandiri PT. Carano Minang Transpor PT. Tanjung Jaya Mutiara
121		Payakumbuh - Piladang - Rao Rao - Batusangkar - Talawi - Sawahlunto	-
122		Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	--
123		Payakumbuh - Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping	-
124	105	Payakumbuh - Gadut - Halaban	PT. Putra Adios Transport PT. Talago Jaya Prima
125	106	Payakumbuh - Limbanang - Suliki	PT. Putra Agung Sepakat PT. Putra Adios Transport PT. Talago Jaya Prima
126	107	Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	PT. Putra Agung Sepakat PT. Putra Adios Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
			PT. Talago Jaya Prima
127	108	Payakumbuh - Suliki - Baruh Gunung	PT. Putra Adios Transport
128	109	Payakumbuh - Limbanang - Mahat	PT. Putra Adios Transport
129	110	Payakumbuh - Batu Hampar - Suayan	PT. Putra Adios Transport
130		Payakumbuh - Taeh - Mungka	-
131		Payakumbuh - Pd. Lawas - Talang Maur	-
132		Payakumbuh - Tj. Pauh - Pkl. Koto Baru	-
133	111	Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Gn. Malintang - Ma. Peti	PT. Kapur Indah Abadi
134		Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Tj. Pauh (Batas Riau)	-
135	112	Payakumbuh - Halaban - Balai Tengah	PT. Yudha Transport Ekspres
136	113	Payakumbuh - Tj. Alam - Tabek Patah - Batusangkar	PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Grand Son Indah
			PT. Harapan Mama Transport
			PT. Minang Jaya Transport
137		Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Muaro - Sijunjung	PT. Haji Maswardi Sekeluarga
			-
138		Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao	-
139	114	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Zona Sikumbang Jaya
			PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Sarah Nursyifa Transport
140	115		PT. Ayah Ibu Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Balai Selasa	PT. Ricky Rajo Transport PT. Sarah Nursyifa Transport
141	116	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Balai Selasa - Tapan	PT. Ayah Ibu Transport PT. Ricky Rajo Transport PT. Sarah Nursyifa Transport
142	117	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Pariaman	PT. Ayah Ibu Transport PT. Melsy Anugrah Transport PT. Sarah Nursyifa Transport
143		Payakumbuh - Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat	-
144	118	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Tampalo Prima Group
145	119	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Ayah Ibu Transport PT. Multi Karya Setangkai PT. Rencana Baru Transport PT. Tampalo Prima Group
146	120	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai - Kt. Besar	PT. Sinamar Transport Mandiri
147		Padang Panjang - Kayu Tanam - Sicincin	-
148	121	Padang Panjang - Kubu Kerambil -	PT. Karya Abadi Jaya Utama PT. Silvia Indah Mandiri

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Simabur - Batusangkar	
149		Solok - Sawahlunto	-
150		Solok - Ombilin - Bukik Siangok - Batusangkar	-
151	122	Solok - Ombilin - Kubu Kerambil - Simabur - Batusangkar	PT. Yanti Citra Pelangi
152		Solok - Sumani - Sulit Air - Tj. Balik	-
153	123	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang	PT. Danau Raya Ibu PT. Tri Saudara Ekspres
154	124	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Tl. Babungo	PT. Tri Saudara Ekspres
155	125	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung	PT. Danau Raya Ibu PT. Muaro Jaya Transport
156		Solok - Ma. Panas - Bukik Sileh - Kp. Bt. Dalam - Alahan Panjang - Surian - Muara Labuh	-
157	126	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh	PT. Mekar Maju Ekspres
158	127	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh - Pd. Aro	PT. Tri Saudara Ekspres PT. Mekar Maju Ekspres PT. Usaha Murni Pratama
159		Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh - Liki - Leter W	-
160	128	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Rencana Baru Transport PT. Tampalo Prima Group
161	129	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao	PT. Muaro Jaya Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		- Koto Baru - Abai Siat - Sitiung Iv	
162	130	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Timpeh	PT. Tampalo Prima Group
163		Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Sitiung - Tj. Simalidu	-
164		Sawahlunto - Talawi - Pd. Ganting - Batusangkar	-
165		Sawahlunto - Tj. Ampalu - Sijunjung	-
166	131	Sawahlunto - Ma. Kalaban - Solok - Lubuk Selasih - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Tampalo Prima Group
167		Malalak - Tandikek - Sp. Koto Mambang - Sicincin	-
168	132	Lubuk Basung - Maninjau - Matur - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Pd. Sibusuk - Sijunjung	PT. Tampalo Prima Group
169		Malalak - Tandikek - Sp. Koto Mambang - Sariak - Pariaman	-
170	133	Lubuk Basung - Pariaman - Sicincin - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Tampalo Prima Group
171		Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
172	134	Rao - Panti - Talu - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Famili Ceria Group
173	135	Lubuk Sikaping - Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Tampalo Prima Group
174	136	Batusangkar - Talawi - Sawahlunto - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao	PT. Tampalo Prima Group
175	137	Batusangkar - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Batusangkar Indah Transport
176		Batusangkar - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	-
177	138	Batusangkar - Padang Panjang - Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat	PT. Helmi Putra Transport
178	139	Batusangkar - Balai Tengah - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Doris Abadi Transport
179	140	Sijunjung - Pd. Sibusuk - Solok - Padang Panjang - Pariaman	PT. Melsy Anugrah Transport
180		Pariaman - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
181		Ma. Labuh - Alahan Panjang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	-
182	141	Cadangan	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
			PT. Laksmana Prov
			PT. Laksmana Tbk
			PT. Pelita Indah Travel
			PT. Putra Salam Prima
			PT. Putra Adios Transport
			PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Karya Abadi Jaya Utama
			PT. Trans Mitra Ibu
			PT. Emkazet Sejahtera Lestari
			PT. Melsy Anugrah Transport
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Lubuk Basung Express
			PT. Penampung Jaya Lemersing
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Talago Jaya Prima
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Bintang Utara Transport
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
			PT. Multi Karya Setangkai
			PT. Batusangkar Indah Transport
			PT. Danau Raya Ibu
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Tampalo Prima Group
183	142	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman	PT. Oto Kawan Transport
Jumlah = 183	Jumlah = 142		

Sumber Data : Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terdapat 142 lintasan trayek yang dilayani oleh perusahaan angkutan pada tahun 2025.

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut}} \\ &= \frac{4 \times 0,5}{4} \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Untuk kondisi angkutan penyeberangan di wilayah Sumatera Barat saat ini terdiri dari 4 (empat) lintasan trayek, dan untuk ke 4 (empat) Lintasan tersebut sudah dilayani oleh angkutan penyeberangan.

Tabel III. 4 Lintasan angkutan penyeberangan di Sumatera Barat

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi
1.	Padang – Tua Pejat	Komersil	2 kali / seminggu
2.	Padang – Sikakap	Komersil	2 kali / seminggu
3.	Padang –Sikalabuan	Perintis	1 kali / seminggu
4.	Padang – Siberut	Perintis	1 kali / seminggu

Sumber data: Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

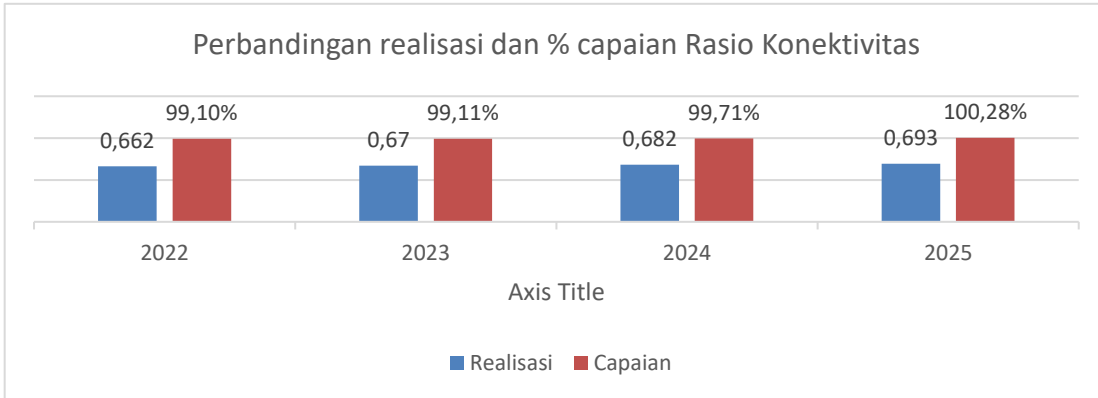
Setelah didapatkan nilai IK 1 dan IK 2, berikut ini didapatkan Rasio konektivitas Provinsi Tahun 2025 = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

$$\begin{aligned} &= (0,776 \times 70) + (0,5 \times 30) \\ &= 54,32 + 15 \\ &= 69,32 / 0,6932 \end{aligned}$$

Rasio Konektivitas 0,6932 artinya sebanyak 69,32 % wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut.

Capaian indikator kinerja tujuan (Rasio Konektivitas) yaitu 100,28 %, merupakan capaian yang memuaskan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 99,71 %, capaian rasio konektivitas mengalami kenaikan 0,57 % di tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan capaian, rasio konektivitas tahun 2025 juga tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah Sumatera Barat semakin baik untuk penyediaan pelayanan transportasinya.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 - 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar III. 2 Grafik Perbandingan realisasi dan % capaian Rasio Konektivitas

Sumber data : data diolah

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), rasio konektivitas ditargetkan 0,695, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yaitu 0,693, maka capaian rasio konektivitas sudah 99,71 % dari target tahun terakhir RPJMD 2021 – 2026).


Untuk perbandingan rasio konektivitas dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 5 Perbandingan rasio konektivitas dengan Kementerian Perhubungan

Objek Perbandingan	Nasional (Kementerian Perhubungan)	Sumatera Barat
Sasaran Strategis	Sasaran 1: Terwujudnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
IKU	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio Konektivitas
Target	2024 = 0,781 2025 = 0,82	2024 = 0,684 2025 = 0,691
Realisasi	2024 = 0,57 (77,98) 2025 = Situs belum update	2024 = 0,682 (99,70) 2025 = 0,693 (100,28%)

Sumber data terkait target dan realisasi Kementerian Perhubungan: http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2025/001/001

Dalam penghitungan rasio konektivitas Kementerian perhubungan memiliki rumus sendiri dalam penghitungannya, yaitu meliputi Konektivitas Transportasi Darat, Konektivitas Transportasi Laut, Konektivitas Transportasi Udara, Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, Konektivitas Transportasi Perkotaan, sedangkan untuk pemerintah daerah yang berada di bawah Kemendagri berpatokan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Tercapainya target rasio konektivitas pada tahun 2025 ini disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu dimulai dari beroperasinya kembali beberapa trayek-trayek yang sebelumnya tidak dilalui oleh para operator serta adanya peningkatan pengurusan izin operasi dari beberapa perusahaan angkutan umum.

Upaya yang bisa dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat melalui Dinas Perhubungan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan angkutan AKDP dan AJDP serta angkutan lainnya dimana untuk pengawasannya langsung ke perusahaan angkutan serta memberikan teguran kepada pengusaha angkutan yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek
- Melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum untuk mengisi trayek – trayek yang sudah tidak dilalui oleh operator yang beroperasi



3.3.1.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi" dengan 2 buah indikator kinerja:

1. Jumlah trayek yang diakses
2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Sasaran strategis "meningkatnya pelayanan jasa transportasi" berarti merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan efisiensi layanan transportasi umum bagi masyarakat. Sasaran strategis ini diukur dengan jumlah trayek yang diakses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum, yang mencerminkan seberapa baik transportasi umum melayani kebutuhan masyarakat.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 6 Target dan realisasi sasaran strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah trayek yang diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %
		2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang	20.512.858 orang	102,56 %
Capaian sasaran strategis					101,28 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan jasa transportasi di Sumatera Barat pada tahun 2025, yaitu dengan rata-rata sebesar 101,28 % dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik, serta dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) semuanya mencapai target.

Selanjutnya analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yang diukur oleh 2 buah indikator kinerja sasaran dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Jumlah Trayek yang diakses

Jumlah Trayek yang di Akses di tahun – n

Indikator pertama untuk mengukur sasaran strategis 1 adalah jumlah trayek yang diakses.

Jumlah trayek yang diakses digunakan untuk mengukur seberapa banyak rute atau jalur angkutan umum yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk tahun 2025 target berdasarkan renstra yaitu 6 trayek, dan dapat terealisasi sebesar 6 trayek dengan capaian kinerja 100 %. Hal itu dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Dinas Perhubungan berupa rekomendasi trayek angkutan perintis, adanya pengawasan angkutan yang telah beroperasi, dan didorong dengan adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan, serta telah dilakukannya survei – survei terkait angkutan di Sumatera Barat yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan nantinya.

Target jumlah trayek yang diakses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Trayek angkutan perintis Damri

Angkutan perintis damri merupakan angkutan di beberapa rute pelosok di Sumatera Barat, beroperasinya angkutan perintis untuk menghubungkan antara daerah terpencil, karena tidak adanya penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Adapun untuk pengadaan sarana bus perintis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan dioperasikan oleh Perum Damri. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan perintis, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan pihak operator, Pemerintah Kab / Kota untuk mengetahui faktor – faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan perintis sehingga dapat diambil langkah – langkah didalam pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berikut ini jaringan trayek angkutan jalan perintis Tahun 2025

Tabel III. 7 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;

Trayek yang dilayani	Jarak (Km) PP	Kab / Kota
Padang Aro – Uluh Suliti	124	Kab.Solok Selatan
Tapan – Indrapura – Air Haji – Balai Salasa – Kambang – Surantih – Batang Kapas - Painan	270	Kab. Pesisir Selatan
Terminal Simpang Empat – Simpang 3 Ophir – Sungai Talang – Pasar Kapar – Pasar Sasak	50	Kab. Pasaman Barat
Terminal Simpang Empat – Ujung Gading	100	Kab. Pasaman Barat

Trayek yang dilayani	Jarak (Km) PP	Kab / Kota
Pariaman – Urek Kaji - P.Kambar – Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	45	Kab. Padang Pariaman
Poltekel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	62	Kab. Padang Pariaman
Tua Pejat - Sioban	90	Kab. Kepulauan Mentawai

Sumber data: Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025)

2. Trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi)

Angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten / kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Barat 2025 terdapat 183 trayek, sesuai yang dijelaskan pada indikator kinerja tujuan Rasio Konektivitas pada tabel III.3 (halaman 22)

3. Trayek AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)

AJDP adalah angkutan antar jemput melalui Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Berikut ini realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 8 Realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di provinsi sumatera barat

No	Kode trayek	Lintasan trayek
1	1112410	Padang – surantih
2	5111201	Padang – bukittinggi
3	5111301	Padang – payakumbuh
4	5111401	Padang - padang Panjang
5	5111501	Padang – solok
6	5111601	Padang – sawahlunto
7	5111701	Padang - padang sago
8	5111801	Padang – Palembang
9	5111802	Padang - lubuk basung
10	5111901	Padang - lubuk sikaping
11	5111902	Padang - kab. Pasaman
12	5112001	Padang - koto tinggi

No	Kode trayek	Lintasan trayek
13	5112002	Padang - baruh gunung
14	5112003	Padang – mungka
15	5112004	Padang – suliki
16	5112101	Padang – batusangkar
17	5112201	None
18	5112401	Padang – painan
19	5112402	Padang – kambang
20	5112403	Padang – indrapura
21	5112404	Padang - lunang silaut
22	5112411	Padang - air haji
23	5112412	Padang -tapan
24	511245	Padang – bayang
25	511246	Padang – surantih
26	511247	Padang - balai selasa
27	5112501	Padang – pariaman
28	5112601	Padang - kab. Pasaman barat
29	5112701	None
30	5112801	Padang - sei.rumbai
31	5121701	None
32	5121801	Bukittinggi - lubuk basung
33	5121802	Bukittinggi – rao
34	5121901	Bukittinggi- lubuk sikaping
35	5121902	Bukittinggi – rao
36	512193	Bukittinggi - kab. Pasaman
37	512194	Bukittinggi - kab. Pasaman
38	5122201	None
39	5122601	Bukittinggi - air bangis
40	5122602	Bukittinggi – talu
41	5122603	Bukittinggi - pasaman barat
42	5122801	Bukittinggi - sei. Rumbai
43	5142401	None
44	5142601	None
45	5142801	None
46	5181801	Padang - lubuk sikaping

Sumber data : Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

4. *Trayek angkutan laut perintis*

Angkutan laut adalah angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.

Angkutan laut perintis sebagai salah satu penopang terhadap kehidupan ekonomi di daerah yang memiliki wilayah perairan terpencil, terisolir, dan terluar dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Tabel III. 9 Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2025

Armada Kapal	Trayek	Ket
KM. Sabuk Nusantara 37 1.200 GT (tonase kotor)	<u>Trayek R-3</u> Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 40 - Siberut / Mailepet - 26 - Sikabaluhan / Pokai - 12 - Labuhan Bajau - 40 - Sigologolo - 17 - Saeru - 34 - P.Tello - 48 - Teluk Dalam - 97 - Sibolga - 97 - Teluk dalam - 48 - P.Tello - 34 - Saeru - 17 - Sigologolo - 80 - Air Bangis - 92 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabaluhan / Pokai - 26 - Siberut / Mailepet - 40 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	R3 = lama hari berlayar adalah 13 hari dengan 28 voyage, 984 mil
KM. Sabuk Nusantara 68 2.000 GT (tonase kotor)	<u>Trayek R-4</u> Teluk Bayur - 89 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabaluhan / Pokai - 12 - Muara Saibi / Subeleng - 14 - Siberut / Mailepet - 20 - Peipei / Mabukkuk - 30 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 18 - Sioban - 33 - Pasapat - 13 - Sikakap - 62 - Sinakak - 62 - Sikakap - 90 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 120 - Sikakap - 13 - Pasapat - 33 - Sioban - 16 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	R4 = lama hari berlayar adalah 14 hari dengan 25 voyage, 1013 mil

Sumber data: Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

5. Trayek Kapal Penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Kondisi Angkutan penyeberangan di wilayah Sumatera Barat saat ini melayani 4 (empat) Lintasan dari Kota Padang – Kab. Kep. Mentawai, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan sembilan bahan pokok,

Tabel III. 10 Lintasan kapal penyeberangan Sumatera Barat

Nama Lintas	Jarak (Mil)
Padang – Siberut	82
Siberut – Tua Pejat	62
Tua Pejat – Sikakap	74,6
Padang – Sikabalu	90

Sumber data : Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

6. Trayek / jaringan jalur Kereta Api

Berikut ini jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat

Tabel III. 11 Jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2025

No	Kelas KA	Nama Kereta Api	Jumlah KA	Jenis perjalanan	Lintasan Pelayanan
Jenis Pelayanan : Ekonomi					
1	Ekonomi	KA Pariaman Exspres	9	8 reguler 1 fakultatif	Naras - Pauh Lima Padang – Naras
	Bandara	KA Minang Kabau Ekspres	12	12 Reguler	BIM - Pulau Air
	KRD Ekonomi	KA Lembah Anai	6	6 reguler	Kayu Tanam - Duku – BIM
	Wisata	KA Mak Itam	2	2 Fakultatif	Sawahlunto - Muaro Kalaban
	Jumlah		29	29	
Jenis Pelayanan : Barang					
2	Semen Klinker	KA Karang Putih	34	24 reguler 10 fakultatif	Bukit putus – Indarung
	CPO	KA Nabutus CPO	2	2 Fakultatif	Bukit putus – Naras
	Jumlah		36	36	

Sumber data: Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja jumlah trayek yang diakses tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	6 trayek	6 trayek	100 %
2022	6 trayek	6 trayek	100 %
2023	6 trayek	6 trayek	100 %
2024	6 trayek	6 trayek	100 %
2025	6 trayek	6 trayek	100 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Indikator kinerja jumlah trayek yang diakses dengan target berdasarkan renstra yaitu sebesar 6 Trayek pada tahun 2021 – 2025, dan dapat terealisasi sebesar 6 Trayek dengan capaian kinerja 100 %. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan pada tahun 2025 berupa pengawasan pada semua trayek – trayek angkutan yang ada di Sumatera Barat.

Kemudian untuk target pada tahun akhir renstra 2026, yaitu 6 trayek, dan diharapkan sampai pada tahun 2026 (Tahun akhir renstra 2021 – 2026) semua jaringan trayek dapat diawasi dengan baik agar pelayanan angkutan semakin bagus.

Untuk indikator kinerja jumlah trayek yang diakses tidak terdapat perbandingan dengan standar Nasional, indikator jumlah trayek yang diakses mendukung capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu Rasio Konektivitas, dimana pada penjelasan sebelumnya sudah disampaikan perbandingan Rasio Konektivitas Sumatera Barat dengan standar Nasional yaitu Kementerian Perhubungan.

Berikut ini faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian indikator kinerja jumlah trayek yang diakses

Tabel III. 13 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan	Dari kegiatan pengawasan didapat informasi terkait kondisi sarana dan prasarana angkutan yang masih belum maksimal	Sudah dilakukannya upaya – upaya koordinasi maupun upaya secara bersurat kepada stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, maupun kanwil Perhubungan yang berlokasi di Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan angkutan (BPTD Wil III Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian, KSOP),	Upaya perbaikan kedepannya dalam ketercapaian indikator kinerja jumlah trayek yang diakses adalah sebagai berikut: 1. Angkutan perintis Damri Akan dilakukan koordinasi dengan Kab / Kota, operator angkutan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku penyelenggara angkutan perintis terkait lintasan / trayek baru, sehingga pelayanan angkutan perintis tepat sasaran (lintasan yang benar – benar menjadi lintasan yang belum dilayani) sehingga diharapkan angkutan perintis nantinya sebagai pemutus mata rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi 2. Angkutan AKDP dan AJDP Akan dilakukan upaya untuk mengingatkan perusahaan untuk lebih teliti dalam melengkapi dan mengajukan persyaratan ke Dishub,

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
		<p>maupun koordinasi kepada Operator angkutan (PT KAI, Perum Damri, dll)</p>	<p>sehingga proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan angkutan umum dapat berjalan dengan lancar, dan angkutan AKDP dan AJDP dapat beroperasi sesuai standar, serta akan menyampaikan informasi terkait trayek yang sudah tidak dilalui oleh angkutan kepada operator angkutan, sehingga trayek tersebut dapat diisi oleh operator angkutan yang ada</p> <p>3. Angkutan laut perintis dan angkutan penyeberangan Akan dilakukan upaya pembahasan usulan jaringan trayek angkutan laut dan angkutan penyeberangan yang dapat mengurangi rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi laut, serta melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan pelabuhan dan angkutan pelayaran di Sumatera Barat</p>

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2. Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang terangkut di Terminal Tipe B pada tahun-n

Indikator kedua untuk mengukur sasaran strategis 1 adalah jumlah penumpang terangkut angkutan umum. Untuk indikator kinerja ini data diperoleh dan didapatkan dari rekapan penumpang terangkut di 5 Terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat, yaitu:

- a) Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang
- b) Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh
- c) Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar
- d) Terminal Tipe B Sago Painan Kab Pesisir Selatan
- e) Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 penetapan target jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2025 adalah sebanyak 23.000.000 penumpang terangkut, namun Dinas Perhubungan melakukan perubahan target pada perjanjian kinerja kepala OPD menjadi 20.000.000, untuk penetapan target perubahan ini dengan mempertimbangkan data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2024, dan setelah berkoordinasi dengan Biro Organisasi maka dilakukan perubahan pada perjanjian kinerja kepala OPD tahun 2025.

Untuk realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2025 adalah 20.512.858 dengan capaian 102,56 %.

Berikut data jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada masing – masing terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat:

Tabel III. 14 Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2025

Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
Padang Panjang	7.831.137
Payakumbuh	4.391.467
Tanah Datar	2.813.241
Sawahlunto	3.182.629
Painan	2.294.384
Total	20.512.858

Sumber data : UPTD Terminal Tipe B wilayah 1 dan wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 15 Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

Indikator Kinerja	Jumlah penambahan penumpang terangkut	Jumlah penumpang terangkut angkutan umum				
		Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	1.000.000	19.000.0000	18.500.000	20.000.000	20.000.000	
Realisasi	1.127.254	18.650.112	18.906.971	20.248.342	20.512.858	
% Capaian	113%	98,15%	102,19%	101,24 %	102,56 %	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk indikator kinerja ini terdapat perbedaan antara tahun 2021 (Renstra 2016 – 2021) dengan tahun 2022 - 2024 (Renstra 2021 – 2026), dimana untuk tahun 2021 indikator kinerjanya yaitu jumlah **penambahan** penumpang terangkut, sedangkan untuk tahun 2022 – 2025 indikator kinerjanya yaitu Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum.

Namun untuk data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2021 dapat diperoleh pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dishub 2021 yaitu sebanyak 18.127.254 orang. Untuk perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar III. 3 Perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Sumber data: data diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan jumlah penumpang terangkut pada tahun 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum Tahun 2025 dengan target pada tahun akhir renstra 2021 – 2026 yaitu untuk target untuk jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2026 (tahun akhir renstra) adalah sebanyak 24.000.000, untuk realisasi pada tahun 2025 ini yaitu sebesar 20.512.858 orang, dan jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra (2026), maka capaiannya baru sebesar 85,47 %, sehingga hal ini nantinya akan dilakukan upaya – upaya peningkatan realisasi pada tahun – tahun selanjutnya (2025 – 2026).

Untuk indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum tidak terdapat perbandingan dengan standar Nasional maupun dengan provinsi lain, karena indikator ini merupakan jumlah penumpang terangkut pada 5 terminal kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan targetnya berdasarkan renstra tahun 2021 – 2026.

Berikut ini analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2025

Tabel III. 16 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Adanya upaya meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, yaitu meningkatkan dan memperbaiki fasilitas Terminal Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> • Terputusnya jalan padang – bukittinggi via Silaiang pada bulan Desember sehingga kendaraan dialihkan ke jalan alternatif via sitinjau lauk, sehingga mengganggu operasional di terminal Kota Padang Panjang • Adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar terminal • Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan 	<p>Solusi yang telah dilakukan mengatasi faktor penghambat yang ada yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan BPJN terkait percepatan perbaikan jalan via silaiang • Telah dilakukan pengawasan (Razia) yang dilakukan di terminal terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan, kemudian kepada sopir 	<p>Upaya perbaikan kedepannya untuk ketercapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe B (fasilitas utama dan penunjang) • Meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kualitas layanan angkutan umum dengan melakukan pengawasan angkutan (Razia) terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan b) Meningkatkan pelayanan di Terminal melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM di terminal tipe B, baik yang bersifat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
	minat menggunakan angkutan umum	angkutan juga diarahkan untuk selalu memasuki wilayah terminal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang	<p>internal maupun eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain hal diatas, berikut ini upaya jangka panjang yang juga bisa dilakukan dalam upaya peningkatan jumlah penumpang yang diangkut: <ol style="list-style-type: none"> a) Perencanaan transportasi terpadu: Pemerintah provinsi dapat mengembangkan rencana transportasi terpadu yang mencakup pengembangan sistem AKDP yang efisien dan berkelanjutan. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan mobilitas masyarakat, perencanaan rute, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya. b) Kebijakan Tarif yang Terjangkau: Pemerintah provinsi dapat mengatur kebijakan tarif yang terjangkau untuk meningkatkan daya saing AKDP dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 13 sub kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 17.047.400.091 yang meliputi belanja penunjang dan urusan, terdapat anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp 35.821.085

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 17 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.440.000	720.000	50
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	2.982.000	2.400.000	80,48
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	1.525.000	1.495.000	98,03
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	960.000	960.000	100
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	1.525.000	1.200.000	78,69
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	9.910.000	9.780.000	98,69
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	9.207.085	9.207.085	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.830.000	1.230.000	67,21
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.830.000	720.000	39,34
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1.952.000	1.920.000	98,36
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	732.000	704.000	96,17
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional			
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	488.000	480.000	98,36
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.440.000	1.433.000	99,51
Total	35.821.085	32.249.085	84,99%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$



Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Tabel III. 18 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) * 50$
jumlah penumpang terangkut angkutan umum	35.821.085	32.249.085	102,56 %	0,13	81,33%

Sumber data: data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran sebesar 84,99 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

Dari sisa anggaran sebesar Rp. 3.572.000 merupakan efisiensi terhadap belanja BBM, perjalanan dinas, makan minum rapat, serta belanja lembur terminal

3.3.2 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio angka Kecelakaan lalu lintas)

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja tujuan adalah rasio angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Renstra tahun 2021 – 2026, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan target rasio angka kecelakaan lalu lintas tahun 2025 adalah sebesar 8,44. Kemudian untuk realisasi tahun 2025 adalah 8,25, sehingga untuk rasio angka kecelakaan lalu lintas tercapai dengan capaian 102,3 % (Indikator rasio angka kecelakaan lalu lintas akan lebih bagus ketika nilainya semakin kecil, yang menggambarkan angka kecelakaan lalu lintas semakin menurun).

Dalam upaya menekan angka kecelakaan, pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan angka kejadian kecelakaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK).

Berdasarkan RUNK tersebut keberhasilan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bisa dilihat dari rasio angka kecelakaan yang merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan dengan parameter tertentu, seperti jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau jarak tempuh, yang hasilnya dapat menggambarkan gambaran proporsi kecelakaan dalam suatu konteks tertentu, membantu analisis dan perbandingan risiko kecelakaan di berbagai wilayah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja tujuan rasio angka kecelakaan lalu lintas, melihat terwujudnya keselamatan transportasi menggunakan indikator angka kematian per 100.000 populasi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja keselamatan jalan.

Berikut ini penghitungan rasio angka kecelakaan pada tahun 2025:

Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah total kematian lalu lintas dalam setahun} \times 100.000}{\text{Jumlah penduduk di daerah tersebut}} \\ &= \frac{488 \times 100.000}{5.914.830} \\ &= 8,25 \end{aligned}$$

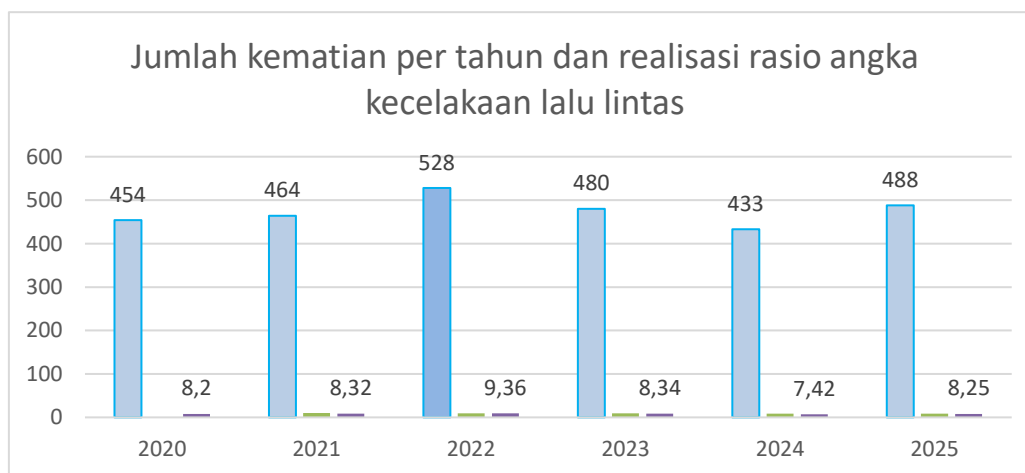
Berdasarkan data diatas, diketahui rasio angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 adalah 8,25, yang mana angka ini dapat menggambarkan gambaran proporsi kecelakaan, dan untuk menjadi perbandingan risiko kecelakaan di wilayah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya maupun tahun – tahun selanjutnya. Berikut ini gambaran rasio angka kecelakaan di wilayah Sumatera Barat

Tabel III. 19 Target dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas

Tujuan : Terwujudnya keselamatan transportasi				
Indikator Kinerja : Rasio angka kecelakaan lalu lintas				
Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah total kematian dalam setahun	Rasio angka kecelakaan lalu lintas	
			Target	Realisasi
2020	5.534.472	454	-	8,20
2021	5.580.232	464	10,13	8,32
2022	5.640.629	528	9,62	9,36
2023	5.757.210	480	9,26	8,34
2024	5.836.160	433	8,88	7,42
2025	5.914.830	488	8,44	8,25

Sumber data:


- Jumlah penduduk tahun 2021 – 2022 diperoleh dari situs: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html> (Data Tahun 2021-2022 dari situs bersumber dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni))
- Jumlah penduduk tahun 2023 diperoleh dari : Buku proyeksi penduduk Kab / Kota Provinsi Sumatera Barat 2020 - 2035 hasil sensus penduduk 2020 yang diterbitkan BPS Provinsi Sumatera Barat yang dirilis bulan Juli tahun 2023
- Jumlah total kematian dalam setahun diperoleh dari data kecelakaan lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sumbar



Gambar III. 4 Rekapitulasi Jumlah kematian per tahun dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas

Sumber Data : data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kematian karena kecelakaan dimana pada saat itu masih adanya wabah covid 19 sehingga mengurangi aktivitas masyarakat diluar, kemudian angka kematian meningkat sampai tahun 2022, dan kembali menurun sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 juga kembali mengalami peningkatan dibanding tahun 2024.



Untuk Perbandingan rasio angka kecelakaan lalu lintas dengan standar Nasional, untuk Kementerian Perhubungan indikator kinerja sarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan rasio angka kecelakaan yaitu angka kematian per 100.000 populasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum selaras sepenuhnya, tetapi masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian (Pusat).

Faktor pendorong tercapainya indikator ini tidak lepas dari lima pilar aksi keselamatan jalan yaitu:

1. Sistem yang berkeselamatan (Bappeda),
2. Jalan yang berkeselamatan (Dinas BMCKTR),
3. Kendaraan yang berkeselamatan (Dinas Perhubungan),
4. Pengguna jalan yang berkeselamatan (Polri),
5. Penanganan pra dan pasca kecelakaan (Dinkes dan jasa raharja).

Seluruh stakeholder berupaya untuk mewujudkan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, yang mana hal ini juga sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan (RUNK).

Berdasarkan rencana strategis tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja tujuan adalah rasio angka kecelakaan lalu lintas, kemudian untuk sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi dan indikator kinerja sarannya yaitu v/c rasio di jalan provinsi

Hubungan antara rasio angka kecelakaan lalu lintas dan kinerja lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kinerja lalu lintas mencakup volume kendaraan, kecepatan, kapasitas jalan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Rasio kecelakaan yang tinggi memungkinkan menunjukkan rendahnya kinerja lalu lintas atau sebaliknya.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi



3.3.2.1. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi" yang dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran V/C Rasio di jalan Provinsi.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 20 Target dan realisasi sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,41	0,40	102,44 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan renstra Dinas Perhubungan target V/C rasio tahun 2025 adalah sebesar 0,47, dan untuk realisasi pada tahun 2024 adalah 0,41, yang berarti target 2025 sudah tercapai pada tahun 2024, karena untuk pengukuran V/C Rasio apabila realisasi semakin tinggi (mendekati 1) maka menunjukkan kinerja lalu lintas yang tidak baik. Oleh karena itu Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian target pada tahun 2025 menjadi 0,41 untuk mempertahankan kinerja positif yang telah dicapai dan dengan realisasi pada tahun 2025 adalah 0,40 dengan capaian sebesar 102,44 %.

1. Indikator Kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

$$\begin{aligned} \text{Formula Penghitungan} &= \text{V/C Rasio di jalan Provinsi} \\ &= \text{Volume} / \text{Kapasitas} \end{aligned}$$

Note : Untuk penghitungan kapasitas jalan berdasarkan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan status ruas jalan menurut fungsi dan statusnya sebagai jalan Provinsi, terdapat 65 ruas jalan provinsi di Provinsi Sumatera Barat.

Namun dari 65 ruas jalan provinsi, terdapat 5 Ruas jalan provinsi yang belum terhubung / belum dapat digunakan secara optimal. Pada tahun 2025 dilakukan perhitungan kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi sebanyak 8 (delapan) ruas, berikut ini nama ruas yang dihitung serta nilai v/c rasio masing – masing ruasnya:

Tabel III. 21 Penetapan Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Perhitungan Terkait Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2025

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KELAS JALAN	PANJANG JALAN	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1.	P.083	Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan	III B	44,10 KM	Bungus Teluk Kabung – Koto XI Tarusan	Kab. Pesisir Selatan
2.	P.070	Batusangkar - Ombilin	III B	17,00 KM	Limo Kaum - Rambatan	Kab. Tanah Datar
3.	P.078	Simpang Koto Mambang - Balingka	III B	39,40 KM	Patamuan - IV Koto	Kab. Padang Pariaman - Kab. Agam
4.	P.037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) – Guguk Cino	III B	10,40 KM	Limo Kaum – Pariangan	Kab. Tanah Datar
5.	P.028	Sicincin – Kurai Taji	III B	16,44 KM	2 x 11 Enam Lingkung – Nan Sabaris	Kab. Padang Pariaman
6.	P.033	Simpang Empat - Sasak	III B	20,00 KM	Pasaman – Sasak Ranah Pesisir	Kab. Pasaman Barat
7.	P.079	Simpang Baso - Piladang	III B	10,50 KM	Baso - Akabiluru	Kab. Lima Puluh Kota

Sumber data : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 22 Realisasi kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi di provinsi sumatera barat tahun 2025

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	VOLUME TOTAL (smp/jam)	KAPASITAS	V/C RASIO	KETERANGAN
1.	P.083	Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan	945	2222	0,43	VC Ratio dengan nilai 0.43 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS)

						berarti Arus dapat dikatakan stabil
2.	P.070	Batusangkar - Ombilin	1390	2943	0,47	VC Ratio dengan nilai 0.47 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
3.	P.078	Simpang Koto Mambang - Balingka	768	1606	0,48	VC Ratio dengan nilai 0.48 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
4.	P.037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	370	1541	0,24	VC Ratio dengan nilai 0.24 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
5.	P.028	Sicincin - Kurai Taji	491	1542	0,32	VC Ratio dengan nilai 0.32

						menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
6.	P.033	Simpang Empat - Sasak	893	2429	0,37	VC Ratio dengan nilai 0.37 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
7.	P.079	Simpang Baso - Piladang	531	1541	0,34	VC Ratio dengan nilai 0.34 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
8.	P.044	Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	1.721	3320	0,52	VC Ratio dengan nilai 0.52 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan

						Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
RATA – RATA KINERJA RUAS JALAN PROVINSI					0,40	VC Ratio dengan nilai 0.40 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi V/C rasio di ruas jalan provinsi adalah 0,40, sedangkan untuk target adalah 0,41 sehingga persentase capaian dari V/C Rasio adalah sebesar 102,44 %,dikarenakan untuk V/C rasio apabila nilainya semakin besar atau mendekati 1 maka kinerja lalu lintas semakin buruk.

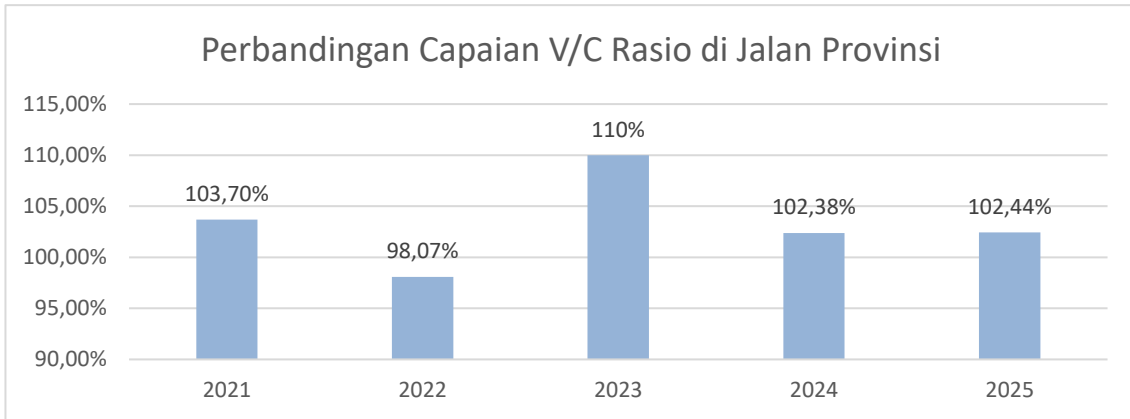
Dapat diketahui kinerja lalu lintas di ruas jalan Provinsi dengan VC Ratio rata - rata dengan nilai 0,40 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus Stabil, kecepatan dapat dikontrol

Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 23 Perbandingan V/C Rasio tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi			
Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2021	0,54	0,52	103,70
2022	0,52	0,53	98,07
2023	0,50	0,45	110
2024	0,42	0,41	102,38
2025	0,41	0,40	102,44

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Gambar III. 5 Perbandingan realisasi kinerja VC Rasio 2021 - 2025

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas capaian indikator kinerja VC Ratio pada jalan provinsi menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum melebihi target, di mana pada tahun 2021 realisasi 0,52 melampaui target 0,54 (103,70%), tahun 2022 sedikit di bawah target dengan realisasi 0,53 dari target 0,52 (98,07%), tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi 0,45 dibanding target 0,50 (110%), dan tahun 2024 realisasi 0,41 mencapai 102,38%, yang secara keseluruhan mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur. Kemudian untuk tahun 2025 mengalami peningkatan dengan realisasi 0,40 dibanding target 0,41 (102,44%).

Untuk perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dinas perhubungan provinsi sumatera barat yaitu 0,45 (pada tahun akhir renstra 2026), berarti target tahun 2026 sudah tercapai pada tahun 2025 yaitu 0,40. Namun hal ini karena target dalam dokumen perencanaan strategis disusun berdasarkan proyeksi dan kebijakan jangka menengah, bukan sekadar mencerminkan hasil survei terbaru. Selain itu, nilai VC Ratio bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun tergantung pada berbagai faktor seperti peningkatan volume kendaraan, kapasitas jalan, dan kebijakan lalu lintas. Oleh karena itu, evaluasi lebih difokuskan pada strategi pencapaian target 2026 (0,45) daripada sekadar memperbaiki target tahunan yang sudah ditetapkan

Indikator kinerja V/C Rasio tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, indikator ini menggambarkan kinerja lalu lintas di ruas jalan yang akan kita survei, tujuannya nanti agar bisa dilakukan perencanaan maupun rekayasa lalu lintas agar kinerja lalu lintas semakin baik, sehingga di IKU Kementerian Perhubungan juga tidak terdapat sasaran maupun indikator terkait v/c rasio

Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja vc rasio

Tabel III. 24 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
<p>Adanya upaya – upaya meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik sehingga kinerja lalu lintas menjadi lebih baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya angkutan atau truk yang ODOL (Over Dimensi Over Load), , sehingga menyebabkan arus kendaraan ODOL tersebut menjadi lambat di jalan raya dan juga mengakibatkan adanya jalan yang rusak, hal itu mempengaruhi kinerja lalu lintas yang ada • Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada • Adanya angkutan travel liar • Belum optimalnya angkutan umum yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi • Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait keselamatan lalu lintas 	<p>Solusi yang sudah dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya penindakan yang dilakukan agar tidak ada lagi angkutan orang / barang yang tidak sesuai standar dan tidak laik jalan, karena hal ini menyebabkan kinerja lalu lintas menurun, seperti kendaraan yang kelebihan muatan akan berjalan lambat, ataupun adanya kecelakaan yang terjadi akibat kelebihan muatan, dll • telah dilakukannya sosialisasi terkait keselamatan LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) 	<p>Berikut adalah beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian V/C rasio</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan dokumen rencana induk jaringan jalan, hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan tranportasi di Sumatera Barat b) Upaya memperkuat penegakan hukum terkait aturan lalu lintas dan keamanan jalan, c) Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi keselamatan dan festival aksi keselamatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, berkendara yang bertanggung jawab, dan pemakaian transportasi yang ramah lingkungan yang dapat membantu mengubah perilaku pengguna jalan dan meningkatkan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
			keselamatan serta meningkatkan kinerja lalu lintas.

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 6 sub kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 17.047.400.091 yang meliputi belanja penunjang dan urusan, terdapat anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp 122.500.185,-

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 25 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.440.000	720.000	50
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	95.860.100	95.489.600	99,61
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12.113.000	10.203.000	84,23
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2.440.000	1.111.000	45,53

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	9.207.085	9.207.085	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.440.000	1.400.000	97,22
Total	122.500.185	118.130.685	79,38%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 26 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran}) : \text{Anggaran}}{100\%}$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) * 50$
V/C Rasio di jalan Provinsi	122.500.185	118.130.685	79,38%	-0,171	7,36%

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

3.3.3 Indikator Kinerja Tujuan (Nilai Akuntabilitas Kinerja)



3.3.3.1. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, diukur dengan 1 buah indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 27 Target dan realisasi sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,00 BB	76,68 BB	103,62 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi.

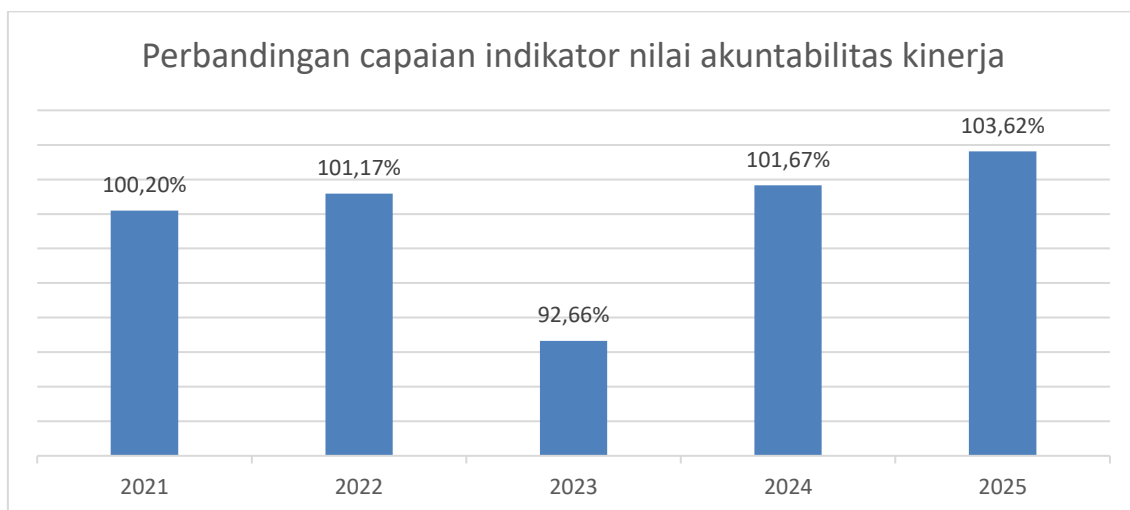
Realisasi SAKIP tahun 2025 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2024 dengan nilai adalah BB (76,68). Bila dibandingkan dengan target berdasarkan renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu tahun 2025 sebesar BB (72,50), namun karena target tersebut sudah tercapai pada tahun sebelumnya, maka target pada tahun 2025 disesuaikan menjadi 74,00 (BB), dan dapat diketahui persentase capaian nilai akuntabilitas adalah sebesar 103,62 %, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik.

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dari tabel dan grafik dibawah ini

Tabel III. 28 Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 - 2025

Target					Realisasi				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
BB (70,00)	BB (71,00)	BB (72,30)	BB (72,00)	BB (74,00)	BB (70,14)	BB (71,83)	B (66,99)	BB (73,20)	BB (76,68)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Gambar III. 6 Perbandingan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat terlihat capaian indikator yang fluktuatif, untuk target nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sebesar 72,30 lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar 72,00 dan berbeda dengan Renstra Dinas Perhubungan yaitu 71,50, hal ini karena pada capaian realisasi tahun 2022 sudah melewati target tahun 2023 sebesar 71,83 sehingga dilakukan perubahan target pada tahun 2023, namun untuk tahun 2024 kembali mengikuti target renstra yaitu 72,00 dikarenakan pada tahun 2023 realisasi hanya 66,99.

Untuk keadaan sekarang nilai akuntabilitas kinerja sudah semakin membaik, dan perbandingan realisasi pada tahun 2025 dengan target akhir renstra (2026) yaitu 73,00 sudah melewati target dan akan dilakukan penyesuaian target ditahun selanjutnya.

Untuk indikator ini tidak ada perbandingan dengan standar nasional karena untuk indikator ini merupakan nilai sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel III. 29 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
<p>Faktor pendorong yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan 2. Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik 3. Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. 4. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai. 5. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun. 6. Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi) 7. Sudah dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber dari BPKP Sumbar 	<p>Terkait komponen penilaian SAKIP yaitu evaluasi internal dan pengukuran kinerja masih memiliki nilai yang kurang, dikarenakan masih kurangnya dokumentasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi internal tersebut</p>	<p>Sudah dibuatkan nota dinas dari Kepala Dinas agar masing – masing bidang melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi secara baik dan berjenjang serta dapat terdokumentasi dengan baik</p>	<p>Upaya perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi SAKIP secara terpisah dengan target yaitu pejabat struktural dan staf agar meningkatkan kesadaran ASN terkait penilaian SAKIP

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 6 sub kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 17.047.400.091 yang meliputi belanja penunjang dan urusan, terdapat anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp 23.115.000

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 30 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.805.000	8.737.000	99,23
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.510.000	12.314.000	98,43
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.700.000	94,44
Total	23.115.000	22.751.000	98,43

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(Pagu\ Anggaran \times Capaian\ Kinerja) - Realisasi\ Anggaran}{(Pagu\ Anggaran)} \times 100\%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$Nilai\ Efisiensi = 50\% + ((tingkat\ efisiensi) / 20 \times 50)$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi

Tabel III. 31 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran}) : \text{Anggaran}}{\times 100\%}$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) * 50$
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	23.115.000	22.751.000	103,62 %	0,05	62,99%

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

3.3.4 Indikator Kinerja Tujuan (Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi)



3.3.4.1. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

1. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan masyarakat. Tujuan pelaksanaan ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 32 Target dan realisasi sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,5%	85,4 %	97,62%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk target berdasarkan Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah 82 %, namun karena sudah tercapai pada tahun sebelumnya maka target dilakukan perubahan menjadi 87,5. berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2025 sebesar 85,4 % dengan capaian kinerja 97,62 % atau dengan kriteria sangat baik.

Untuk pengukuran capaian indikator kinerja ini, survei dilakukan dengan melakukan penyebaran form kuesioner kepada pihak perusahaan maupun pemohon terkait andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini dasar penilaian kinerja yang dilakukan:

Tabel III. 33 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber data : PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

METODE PENGHITUNGAN:

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1

Contoh Cara Perhitungan

Dari 11 Pertanyaan (untuk responden 1 orang) misalnya:

- 4 Pertanyaan dinilai "A" → 4 X 4 = 16
- 3 Pertanyaan dinilai "B" → 3 X 3 = 9
- 3 Pertanyaan dinilai "C" → 3 X 2 = 6
- 1 Pertanyaan dinilai "D" → 1 X 1 = 1

TOTAL 32

Nilai Maksimal 44 (11 pertanyaan x 4)

$$\text{Nilai IKM} = \frac{32}{44} \times 100\% = 72,73 = \text{Mutu Layanan C (Kurang Baik)}$$

Adapun data perusahaan atau pemohon sebagai berikut :

Tabel III. 34 Nama responden dalam pengukuran indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

No	Nama responden	Lokasi responden
1	PT. Farhan Adjie Pratama	Kota Padang
2	PT. Adhitia Bina Persada	Kota Padang
3	PT. Tjahaja Baru Agri	Kota Padang
4	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri	Kota Padang

No	Nama responden	Lokasi responden
5	PT. Blue Bird Tbk Cabang Padang	Kota Padang
6	PT. Kamang Jaya Agam	Kabupaten Agam
7	PT. Sago Mitra Sejati	Kabupaten Lima Puluh Kota
8	PT. Dagang Pesisir Jaya	Kabupaten Agam
9	PT. Tampalo Prima Group	Kabupaten Sijunjung
10	PT. Agrimitra Utama Persada	Kota Padang

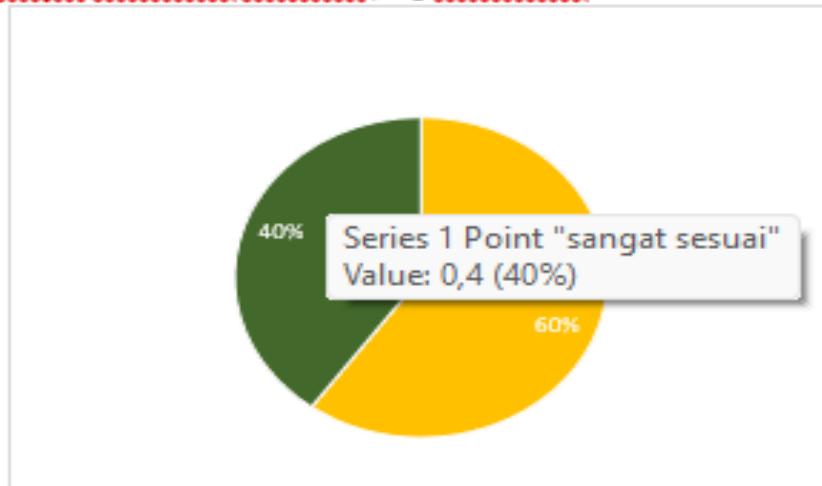
Sumber Data : data diolah

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pengolahan data dan perhitungan data hasil survei kepuasan perusahaan atau pemohon menggunakan google form dapat dilihat sebagai berikut:

Pertanyaan 1

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang informasikan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

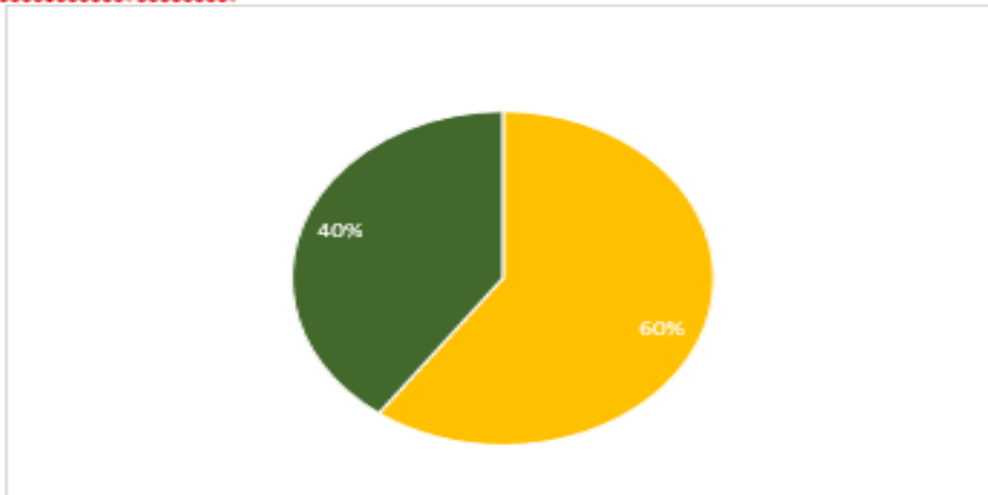
Tabel III. 35 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 1

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak sesuai	-	-
Kurang sesuai	-	-
Sesuai	60%	$60 \times 3 = 180$
Sangat sesuai	40%	$40 \times 4 = 160$
Total		$= 340 / 4 = 85$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 85 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 2

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kemudahan prosedur yang dialami untuk mendapatkan layanan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

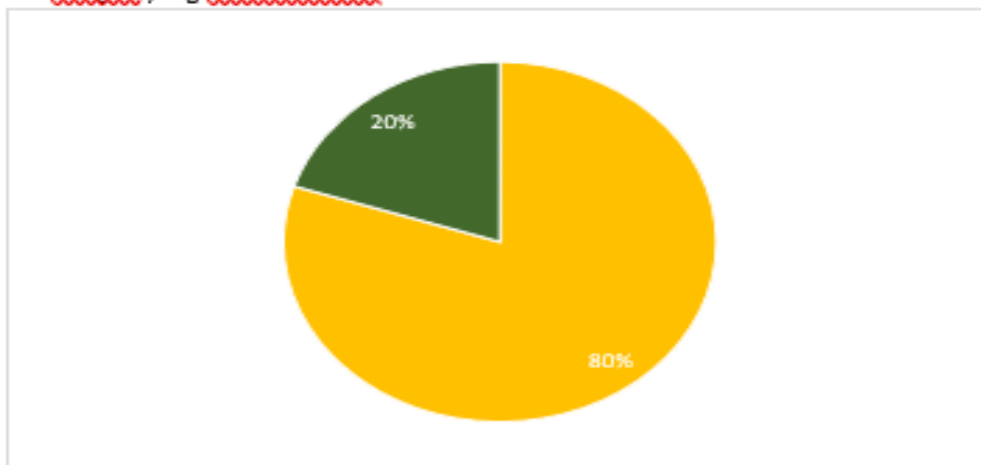
Tabel III. 36 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 2

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak mudah	-	-
Kurang mudah	-	-
Mudah	60%	$60 \times 3 = 180$
Sangat mudah	40%	$40 \times 4 = 160$
Total		$= 340 / 4 = 85$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 85 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 3

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kesesuaian biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

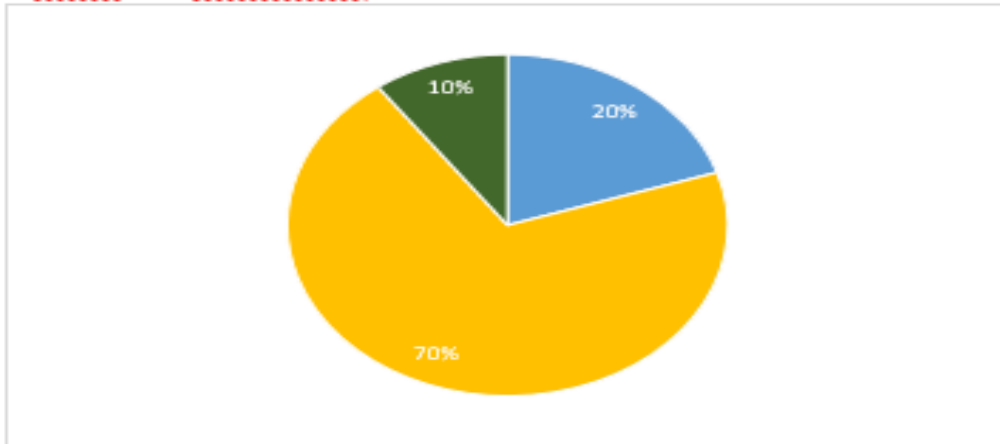
Tabel III. 37 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 3

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak sesuai	-	-
Kurang sesuai	-	-
Sesuai	80%	$80 \times 3 = 240$
Sangat sesuai	20%	$20 \times 4 = 80$
Total		$= 320 / 4 = 80$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 80 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 4

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

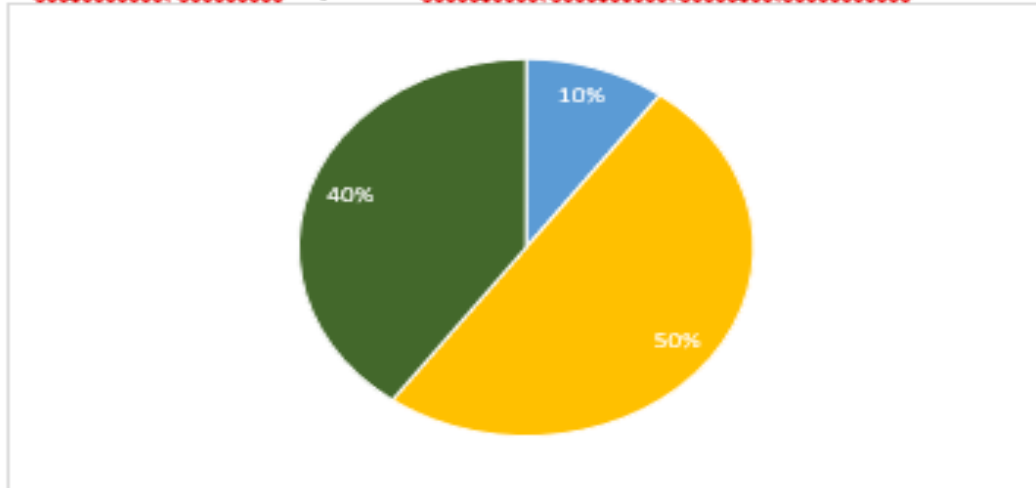
Tabel III. 38 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 4

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak sesuai	-	-
Kurang sesuai	20%	$20 \times 2 = 40$
Sesuai	70%	$70 \times 3 = 210$
Sangat sesuai	10%	$10 \times 4 = 40$
Total		$= 290 / 4 = 72.5$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 72.5 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 5

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kesiapan petugas pelayanan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

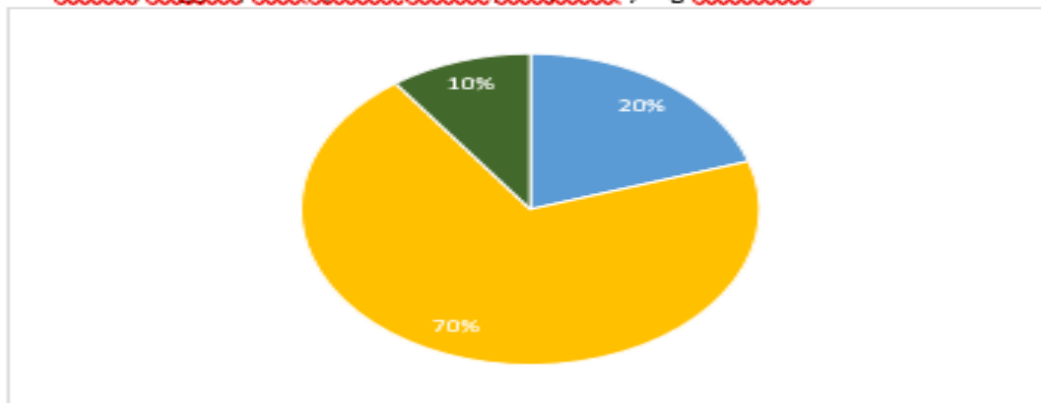
Tabel III. 39 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 5

Keterangan	Persentase	Jumlah
Lambat	-	-
Kurang cepat	10%	$10 \times 2 = 20$
Cepat	50%	$50 \times 3 = 150$
Sangat cepat	40%	$40 \times 4 = 160$
Total		$= 330 / 4 = 82,5$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 82,5 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 6

6. Bagaimana kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

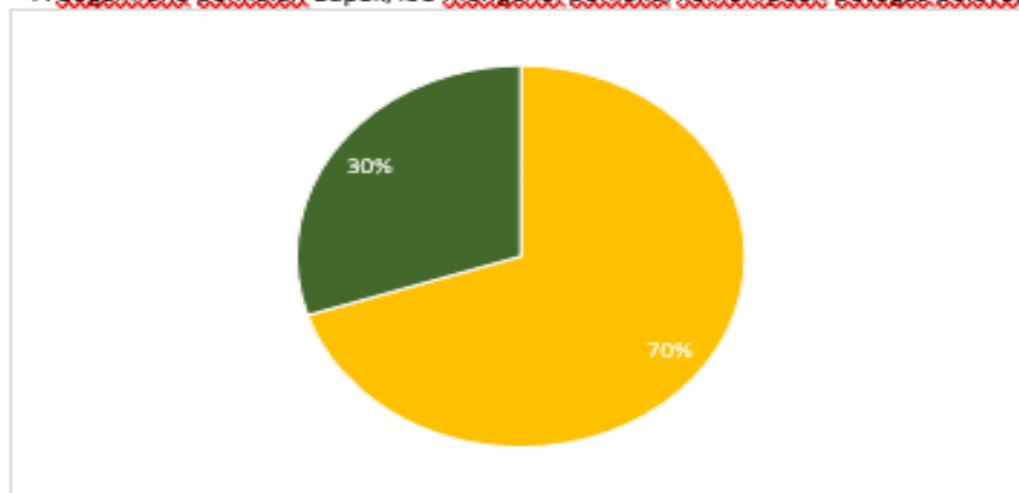
Tabel III. 40 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 6

Keterangan	Persentase	Jumlah
Lambat	-	-
Kurang cepat	20%	$20 \times 2 = 40$
Cepat	70%	$70 \times 3 = 210$
Sangat cepat	10%	$10 \times 4 = 40$
Total		$= 290 / 4 = 72,5$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 72,5 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 7

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai perilaku/kemampuan petugas pelayanan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

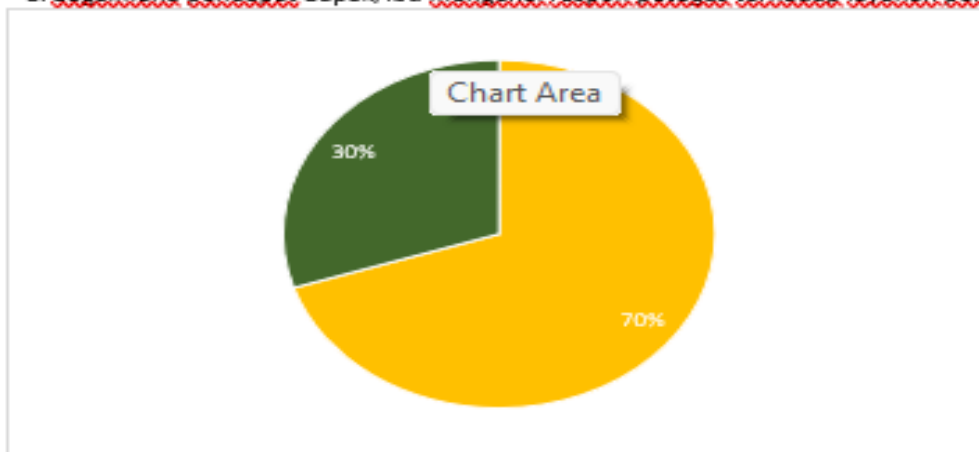
Tabel III. 41 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 7

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak baik	-	-
Kurang baik	-	-
Baik	70%	$70 \times 3 = 210$
Sangat baik	30%	$30 \times 4 = 120$
Total		$= 330 / 4 = 82,5$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 82,5 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 8

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai respon petugas terhadap layanan pengaduan?



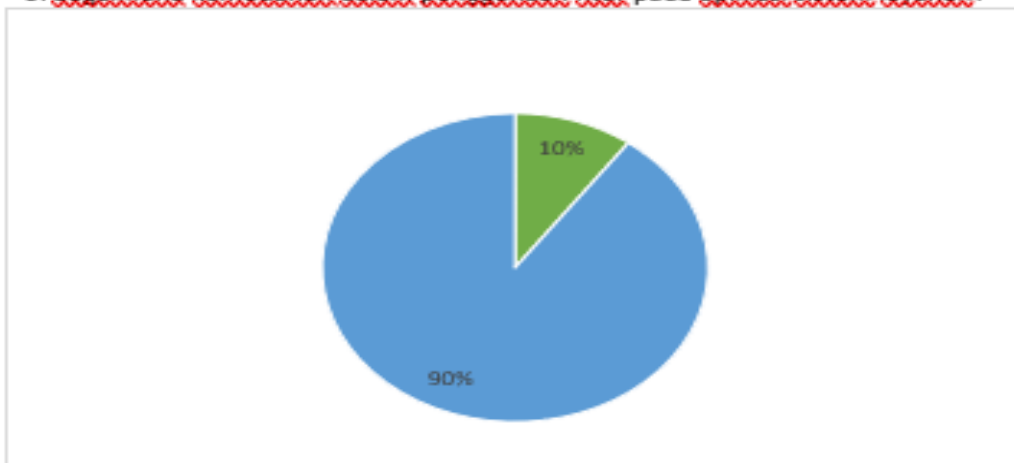
Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Nilai rata-rata per unsur dihitung sebagai berikut

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat tidak cepat	-	-
Tidak cepat	-	-
Cepat	70%	$70 \times 3 = 210$
Sangat cepat	30%	$30 \times 4 = 120$
Total		$= 330 / 4 = 82,5$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 82,5 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Pertanyaan 9

9. Bagaimana kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan?



Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Nilai rata-rata per unsur dihitung sebagai berikut

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak mudah	-	-
Kurang mudah	10%	$10 \times 2 = 20$
Mudah	90%	$90 \times 3 = 270$
Sangat mudah	-	-
Total		$= 290 / 4 = 72,5$ Nilai IKM setelah di konversi adalah 72,5 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data: data diolah

Secara keseluruhan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) di dapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sector transportasi sebesar 80 dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 42 Hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2025

No	Nomor responden	Nilai Unsur Pelayanan									Rata-rata
		u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9	
1	PT. Farhan Adjie Pratama	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3.44
2	PT. Adhitia Bina Persada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	PT. Tjahaja Baru Agri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

No	Nomor responden	Nilai Unsur Pelayanan									Rata-rata
		u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9	
4	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri	3	3	3	2	2	2	3	4	3	2.78
5	PT. Blue Bird Tbk Cabang Padang	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3.44
6	PT. Kamang Jaya Agam	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3.11
7	PT. Sago Mitra Sejati	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3.56
8	PT. Dagang Pesisir Jaya	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2.78
9	PT. Tampalo Prima Group	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3.67
10	PT. Agrimitra Utama Persada	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3.22
Total nilai per unsur		34	34	32	31	33	29	33	33	29	32
IKM per unsur		3.4	3.4	3.2	3.1	3.3	2.9	3.3	3.3	2.9	3.2
Skor KM Total		80									

Sumber data : data diolah

Dengan nilai IKM yang didapat sebesar 80 maka mutu pelayanan masuk kedalam kategori Baik (B).

Untuk Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 43 Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	79 %	79,58 %	100,73 %
2023	80 %	81,1 %	101,38 %
2024	81 %	86,90 %	107,28 %
2025	87,5 %	85,4 %	97,62%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 belum terdapat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait pelayanan organisasi, kemudian untuk tahun 2022 – 2024 capaian kinerja mengalami kenaikan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (tahun akhir renstra 2026 sebesar 83 %) sudah mencapai target, dan akan dilakukan penyesuaian pada target tahun selanjutnya.

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional, berdasarkan capaian kinerja Kementerian Perhubungan yang terdapat pada situs <http://eperformance.dephub.go.id>, dapat dilihat indikator kinerja Kementerian Perhubungan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan transportasi dengan target tahun 2025 adalah ?? dengan realisasi (Belum update) dan capaian ??.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan memiliki cara penghitungan sendiri terkait indikator indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkat pelayanan sektor perhubungan.

Dalam pencapaian target, berikut ini faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian indikator kinerja

Tabel III. 44 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
<p>1. Kualitas sarpras yang ada di terminal Tipe B</p> <p>2. Adanya Koordinasi yang baik secara internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan penilaian tingkat kepuasan pelayanan organisasi dapat</p>	<p>1. Keterbatasan dalam sumber daya organisasi, baik itu dalam hal personel, anggaran, atau infrastruktur, juga dapat membatasi kemampuan organisasi untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan</p> <p>2. Kurangnya minat atau tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengisi kuesioner</p>	<p>1. Sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelayanan organisasi serta efektivitas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait barcode survey IKM ini, dan menyebarkan</p>	<p>1. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk rahabilitasi terminal</p> <p>2. Untuk upaya perbaikan perlu berfokus pada peningkatan kualitas layanan dengan memperbaiki proses, melatih staf, dan menerapkan praktik terbaik dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa di Terminal Tipe B</p>

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
<p>terlaksana dengan baik</p> <p>3. Dukungan teknologi sehingga pengambilan hasil dapat dilakukan dengan menarik data dari barcode pengisian.</p>	<p>3. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk pengembangan sarana prasarana terminal</p>	<p>secara aktif di media sosial yang ada</p> <p>3. Bersurat kepada TAPD untuk mengalokasikan secara terpisah untuk pengembangan sarpras terminal, mengingat terminal merupakan sumber PAD Pemerintah Provinsi</p>	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 sub kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai 1. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 45 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.805.000	8.737.000	99,23
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.510.000	12.314.000	98,43
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.700.000	94,44
Total	23.115.000	22.751.000	98,43

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(Pagu\ Anggaran \times\ Capaian\ Kinerja) - Realisasi\ Anggaran}{(Pagu\ Anggaran)} \times 100\ %$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%

Tabel III. 46 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) * 50$
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	23.115.000	22.751.000	98,43%	0,005	51.18%

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

3.4 Realisasi Anggaran

Tabel III. 47 Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Belanja	Anggaran total	Realisasi (RP)	Persentase Per Anggaran Total
1	Belanja gaji dan tunjangan	9.907.071.942	9.605.134.111	96,95 %
2	Belanja Penunjang Urusan	15.298.876.719	14.848.080.617	97,05 %
3	Belanja Urusan	13.550.353.347	11.916.081.8	87,93 %
	TOTAL	38.756.302.008	24.453.214.728	93,98%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 48 Realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan Program

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran TA 2025	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.298.876.719	14.848.080.617	97,05
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.742.471.372	1.628.334.490	93,45
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.172.000	3.104.000	97,86
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2.880.000	2.833.000	98,37
	TOTAL	17.047.400.091	16.482.352.107	97%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 49 Realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2025:

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.298.876.719	14.848.080.617	97,05	450.796.102
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.115.000	22.751.000	98,43	364.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.805.000	8.737.000	99,23	68.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.510.000	12.314.000	98,43	196.000
1.1.3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.700.000	94,44	100.000
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.159.176.942	9.826.427.111	96,72	332.749.831
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.907.071.942	9.605.134.111	96,95	301.937.831
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.000.000	203.310.000	86,88	30.690.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.105.000	17.983.000	99,33	122.000
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.052.500	43.609.254	98,99	443.246
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44.052.500	43.609.254	98,99	443.246
1,4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	36.069.000	28.983.000	80,35	7.086.000
1.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	12.704.000	10.141.000	79,83	2.563.000
1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	23.365.000	18.842.000	80,64	4.523.000
1,5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.981.000	4.722.900	94,82	258.100
1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.981.000	4.722.900	94,82	258.100
1,6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.974.468.926	1.937.319.084	98,12	37.149.842
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.433.000	21.302.849	99,39	130.151
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.411.000	9.776.100	67,84	4.634.900
1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	5.927.400	98,79	72.600
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.981.800	65.152.105	97,27	1.829.695
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.570.500	71.237.030	84,23	13.333.470
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.060.000	6.000.000	99,01	60.000
1.6.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.775.012.626	1.757.923.600	99,04	17.089.026

1,7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.150.000	47.064.000	97,74	1.086.000
1.7.1	Pengadaan Mebel	48.150.000	47.064.000	97,74	1.086.000
1,8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.789.987.551	2.723.850.577	97,63	66.136.974
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	0
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.404.000	238.021.398	80,57	57.382.602
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.489.583.551	2.480.829.179	99,65	8.754.372
1,9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.875.800	213.353.691	97,48	5.522.109
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.917.800	114.608.676	95,57	5.309.124
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.590.000	20.570.000	99,9	20.000
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.368.000	78.175.015	99,75	192.985
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.742.471.372	1.628.334.490	93,45	114.136.882
2,1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.188.494.000	1.143.187.265	96,19	45.306.735
2.1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	54.294.000	50.955.000	93,85	3.339.000
2.1.2	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1.134.200.000	1.092.232.265	96,3	41.967.735
2,2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	413.795.187	351.351.540	84,91	62.443.647
2.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	412.355.187	350.631.540	85,03	61.723.647
2.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.440.000	720.000	50	720.000
2,3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	16.902.000	15.835.000	93,69	1.067.000
2.3.1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	2.982.000	2.400.000	80,48	582.000
2.3.2	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	1.525.000	1.495.000	98,03	30.000
2.3.3	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	960.000	960.000	100	0
2.3.4	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	1.525.000	1.200.000	78,69	325.000
2.3.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	9.910.000	9.780.000	98,69	130.000

2,4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	107.973.100	105.692.600	97,89	2.280.500
2.4.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	95.860.100	95.489.600	99,61	370.500
2.4.2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12.113.000	10.203.000	84,23	1.910.000
2,5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2.440.000	1.111.000	45,53	1.329.000
2.5.1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2.440.000	1.111.000	45,53	1.329.000
2,6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	9.207.085	9.207.085	100	0
2.6.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	9.207.085	9.207.085	100	0
2,7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.830.000	1.230.000	67,21	600.000
2.7.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.830.000	1.230.000	67,21	600.000
2,8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.830.000	720.000	39,34	1.110.000
2.8.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.830.000	720.000	39,34	1.110.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.172.000	3.104.000	97,86	68.000
3,1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.952.000	1.920.000	98,36	32.000
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1.952.000	1.920.000	98,36	32.000
3,2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	732.000	704.000	96,17	28.000
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	732.000	704.000	96,17	28.000
3,3	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	488.000	480.000	98,36	8.000
3.3.1	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	488.000	480.000	98,36	8.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.880.000	2.833.000	98,37	47.000

4,1	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	2.880.000	2.833.000	98,37	47.000
4.1.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.440.000	1.433.000	99,51	7.000
4.1.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.440.000	1.400.000	97,22	40.000
Total		17.047.400.091	16.482.352.107		565.047.984

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 14 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 %, penyebabnya antara lain sisa anggaran dari rincian belanja sub kegiatan yang tidak terealisasi serta efisiensi anggaran. Sementara sisa kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan kinerja Dinas Perhubungan, untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 101,25%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat disimpulkan di tingkat sasaran seluruh indikator kinerja sasaran telah tercapai.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Esselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa R. Soeprapto No.1 No. 12 Telp/WA :08117538111

<http://dishub.sumbarprov.go.id>

PADANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM**

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Sumatera Barat

Mahyeldi

PIHAK PERTAMA,

Dedy Diantolani,S.Sos.,MM
NIP. 19721222 199403 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**


OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	23.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,41
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.855.477.865	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.253.810.929	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.710.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.880.000	APBD
JUMLAH		9.120.878.794	APBD

Padang, Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT




MAHYELDI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


DEDY DIANTOLANI, S.Sos., MM
 NIP. 19721222 199403 1 002

Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

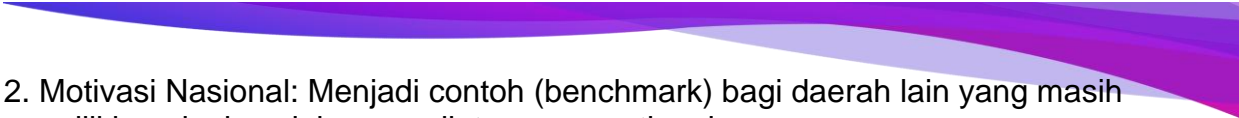
Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 menerima penghargaan di tingkat nasional dan internasional, antara lain:

No	Penghargaan	Diserahkan oleh	Diterima oleh	Hari/tanggal penyerahan	Tempat penyerahan	Asal penghargaan	Link Berita	
1	Penghargaan Pembina terbaik II mengemban serta mendidik pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025 Pada pemilihan di Provinsi dan Nasional	Dirjen Perhubungan Darat. (Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Rabu, 17 September 2025	Kantor Kementerian perhubungan di Jakarta Pusat	Menteri Perhubungan RI	https://www.instagram.com/p/DO43UgEAVKR/?igsh=d25zajZ2azdyMnp	
2	Perhargaan implementasi rekomendasi keselamatan di perlintasan sebidang Tahun 2025	Direktur Jenderal Perkeretaapian	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Selasa, 13 Januari 2026	Online	Direktur Jenderal Perkeretaapian		

Penghargaan yang diberikan pada 13 Januari 2026 ini merupakan hasil dari Evaluasi Perlintasan Sebidang Tahun 2025. Mengingat perlintasan sebidang (pertemuan jalan raya dan jalur kereta) adalah titik dengan risiko kecelakaan tertinggi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJK) menggunakan momen ini untuk memvalidasi daerah mana saja yang serius menjalankan regulasi keselamatan.

Bagi Pemerintah Daerah atau unit kerja yang menerima penghargaan ini, hal tersebut menandakan:

1. Validasi Kinerja: Dianggap berhasil menjalankan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar keamanan transportasi.

- 
2. Motivasi Nasional: Menjadi contoh (benchmark) bagi daerah lain yang masih memiliki angka kecelakaan perlintasan yang tinggi.
 3. Prioritas Anggaran: Biasanya daerah yang proaktif akan lebih mudah